

TAHUN 2019-2024

RENCANA STRATEGIS
BAPPELITBANGDA



REVISI



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2024.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sesuai visi dan misi yang ditetapkan Kepala Daerah terpilih. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami dan mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.



Dokumen Rencana Strategis Bappelitbangda akan menjadi acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah melalui Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD. Segala kekurangan dalam Renstra ini, kami haturkan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Besar harapan kami semoga Renstra ini bermanfaat.

Sumber, 2021

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON

SUHARTONO

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,	6
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda	37
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	40
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	40
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
	3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat	44
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	52
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	54
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	62
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII	PENUTUP	67
LAMPIRAN		70

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Profil Sumber Daya Manusia Tahun 2021 16
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon menurut golongan pangkat tahun 2021 17
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 17
Tabel 2.4	Rekapitulasi sarana dan prasarana Bappelitbangda Kabupaten Cirebon 19
Tabel 2.5	Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2015-2019 20
Tabel 2.6	Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2019-2024 21
Tabel 2.7	Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2015 – 2019..... 22
Tabel 2.8	Anggaran, realisasi belanja dan rasio program kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2015 – 2019 23
Tabel 29	Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2021..... 34
Tabel 3.1	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 42
Tabel 3.2	Permasalahan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon berdasarkan sasaran Renstra Bappenas beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya 45
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 46
Tabel 3.4	Permasalahan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya 48
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 50
Tabel 3.6	Isu-Isu Strategis 51
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon 52
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 53
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon 53
Tabel 5.1	Matrik Analisis SWOT 56
Tabel 5.2	Matrik Rumusan Strategi 57
Tabel 5.3	Strategi, Arah Kebijakan dan Program 57
Tabel 5.4	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 58
Tabel 5.5	Matrik Pembangunan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 59
Tabel 7.1	Indikator kinerja Perangkat Daerah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 61
Tabel 7.2	Indikator kinerja program yang mengacu pada tujuan dan sasaran RENSTRA 62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon	15
Gambar 2.2 Tingkat pendidikan pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon tahun 2021	18
Gambar 3.1 Persentase jumlah Perangkat Daerah terkait kebutuhan ASN Perencana	33
Gambar 5.1 Tematik Pembangunan Bappelitbangda Kabipaten Cirebon Tahun 2019-2024	59

Lampiran XXVII : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 93 Tahun 2021
Tanggal : 27 September 2021
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019-2024

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah. Keselarasan dan sinkronisasi dalam perencanaan sangat diperlukan, agar tujuan tercapai dan tepat sasaran.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan :

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- c. Rencana pembangunan tahunan, yaitu Rencana Kerja (RENJA).

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon adalah salah satu dokumen perencanaan Bappelitbangda untuk periode lima tahun periode 2019-2024 yang akan dilakukan revisi sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon mengacu pada dokumen RPJMD juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 No. 114, Tambahan lembaran Negara No. 5887.);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - g. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - i. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015 – 2019;
 - j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- o. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D)
- r. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D)
- s. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021 Nomor 47, Seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah sebagai acuan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Rencana Kerja dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

Tujuan disusunnya Rencana strategis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon adalah:

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2019-2024, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD;

- b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
- c. Merumuskan rencana kegiatan kerangka pendanaan perangkat daerah sesuai dengan program yang telah disepakati dengan DPRD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon menyelenggarakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Urusan Penelitian dan Pengembangan. Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, adalah sebagai berikut :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah,
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan proses perumusan, penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan, pengendalian pembangunan daerah, kebijakan kerjasama penelitian, pengendalian perencanaan dan evaluasi kinerja perencanaan serta penelitian dan pengembangan teknologi.

- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bappelitbangda, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - c. perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. perencanaan perekonomian dan sumber daya alam;
 - e. perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. penelitian dan pengembangan daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - h. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

I. Kepala Badan

- 1) Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - d. perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. perencanaan perekonomian dan sumber daya alam;

- f. perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
- g. penelitian dan pengembangan daerah;
- h. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretariat Badan

- 1) Sekretariat Badan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Badan;
 - b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan
 - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/ barang milik daerah;
 - h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata

- laksana;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

III. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah

- 1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- 2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - e. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - f. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - g. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - h. pengoordinasian dan penyelarasan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - i. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - j. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan

- daerah;
- k. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - l. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
 - m. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - n. penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - o. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - p. pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah;
 - q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- 1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat.
- 2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat

- Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/ lembaga di provinsi dan kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

V. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- 1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- 2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

- di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/ lembaga di provinsi dan kabupaten bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

VI. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- 1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.;
- 2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Infrastruktur dan

Kewilayahan;

- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/ lembaga di provinsi dan kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

VII. Bidang Penelitian dan Pengembangan

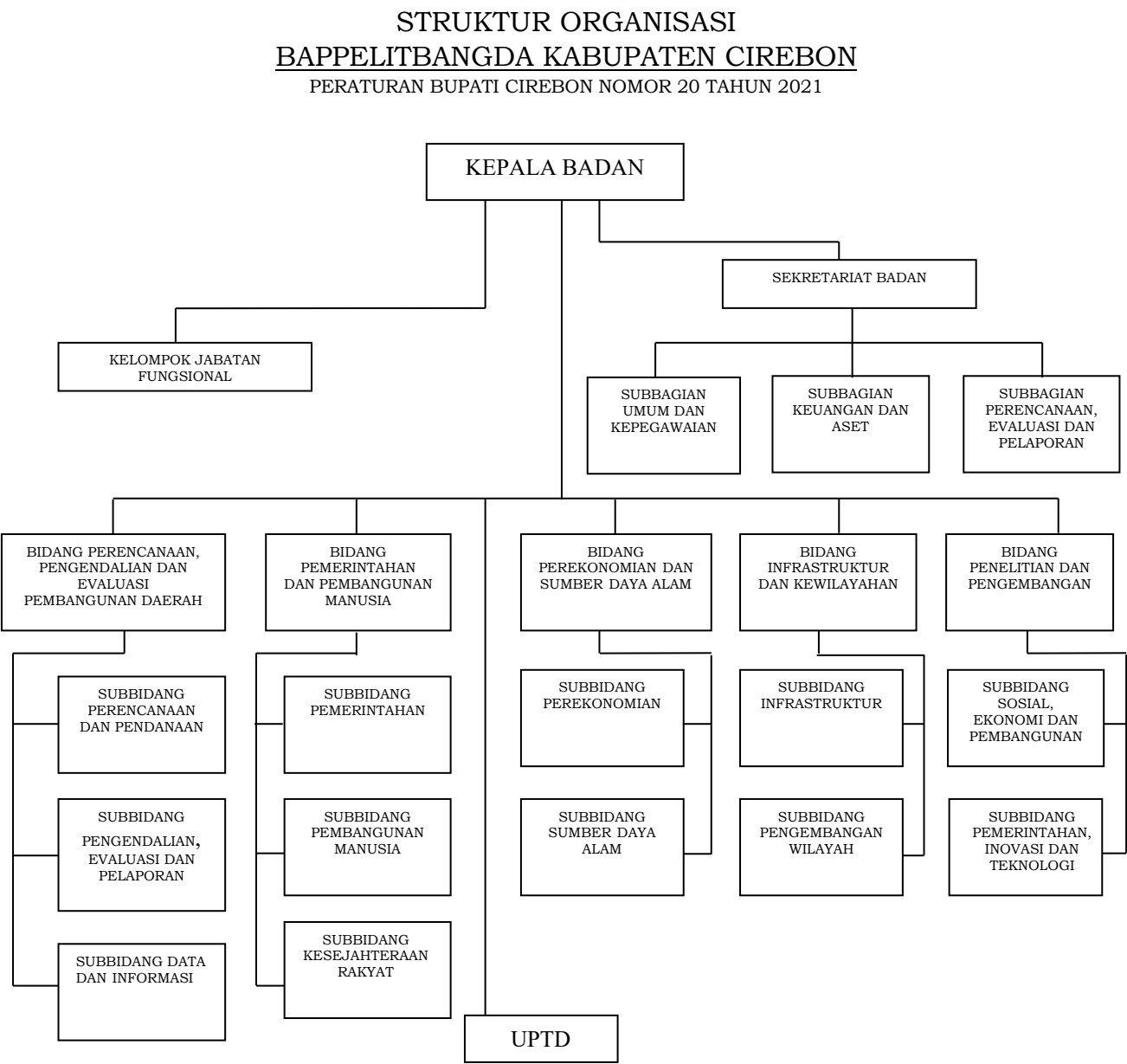
- 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah.
- 2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada nomor (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 2.1



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappelitbangda, jumlah sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Januari 2019, kekuatan sumber daya manusia Bappelitbangda adalah sebanyak 64 orang, terdiri atas 48 PNS dan 16 non PNS. Dari sejumlah PNS itu, 17 orang (35,41 %) berpendidikan master, 23 orang (47,92 %) berpendidikan Sarjana, 2 orang (4,17 %) Sarjana Muda/D3, 4 orang (8,33 %) berpendidikan SLTA, dan 2 orang (4,17 %) berpendidikan SLTP/SD sebagaimana Tabel 1. Dari

pegawai tersebut 19 orang pegawai yang menduduki jabatan struktural, satu orang arsiparis dan sisanya sebanyak 26 orang sebagai pelaksana. Bappelitbangda adalah salah satu lembaga di tingkat daerah yang pegawainya memiliki latar belakang pendidikan paling bervariasi, terdiri dari teknik (15,15 %), ekonomi (6,06 %), dan sosial (3,03%). Sementara itu, latar belakang keilmuan lainnya meliputi Administrasi Negara; Pemerintahan, Akuntansi; memiliki persentase 39,36 %.

Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, telah coba disusun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan diklat diantaranya diklat penjenjangan baik struktural maupun fungsional teknis khususnya dalam bidang informasi teknologi, dan diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk menunjang keahlian dan menambah wawasan di bidang yang terkait dengan sektor bidang tugasnya.

TABEL 2.1
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2021

No.	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG)					JML
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP/SD	
P N S							
1	JABATAN PIMPINAN TERTINGGI	1		-	-	-	1
2	ADMINISTRATOR	5	1	-	-	-	6
3	PENGAWAS	7	8	-	-	-	15
4	FUNGSIONAL PERENCANA	3	1	-	-	-	4
5.	FUNGSIONAL ARSIPARIS	-	2	-	-	-	2
6	PELAKSANA	1	11	2	4	2	20
JUMLAH PNS		17	23	2	4	2	48
JUMLAH NON PNS		1	8	-	7	-	16
JUMLAH TOTAL		18	31	2	11	2	64

Sumber Data : Bappelitbangda, Oktober 2021

Sesuai dengan dengan UU No 5 Tahun 2014 pengklasifikasian berdasarkan

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi : 1
- b. Jabatan Administrasi (JA)
 - Administrator : 6
 - Pengawas : 15
 - Pelaksana :
- c. Jabatan Fungsional keahlian:
 - Ahli Pertama : 1 (blm dilantik)

TABEL 2.2
Jumlah Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
Menurut Golongan Pangkat Tahun 2021

No.	Unit	Gol I-II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Kepala	0	0	1	1
2	Sekretariat	3	8	3	14
3	Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Daerah	0	5	2	7
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	5	2	8
5.	Bidang Perekonomian dan SDA	0	4	2	6
6	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1	4	1	6
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan	0	4	1	5
8	Menjabat Kuwu	0	1	0	1
JUMLAH TOTAL		5	31	12	48

Sumber Data : Bappelitbangda, Oktober 2021

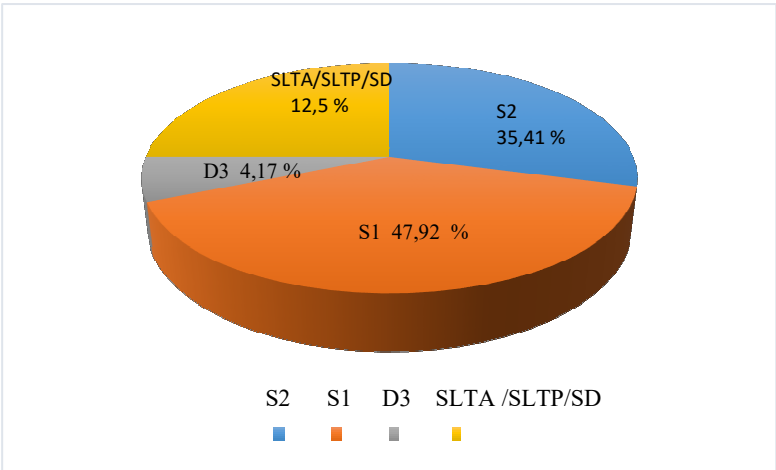
TABEL 2.3
Komposisi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
Berdasarkan Jenis Kelamin 2021

NO.	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		Jumlah (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Kepala	1	-	1
2	Sekretariat	9	5	14
3	Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Daerah	5	2	7
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3	5	8
5.	Bidang Perekonomian dan SDA	2	4	6
6	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4	2	6
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan	4	1	5
8	Menjabat Kuwu	1	-	1
JUMLAH TOTAL		29	19	48

Sumber Data : Bappelitbangda, Oktober 2021

Jumlah pegawai di Bappelitbangda Kabupaten Cirebon sebanyak 48 orang dengan didominasi oleh golongan III sebanyak 31 orang atau 64,58 % dari keseluruhan pegawai Bappelitbangda Kabupaten, disusul 12 orang (25,00 %) golongan IV dan 5 orang (10,52 %) golongan I dan II. Pegawai non PNS sebanyak 16 orang, jumlah total sebanyak 64 orang.

Gambar 2.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Bappelitbangda
Kabupaten Cirebon Tahun 2021



Mayoritas pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon berpendidikan S1 atau 47,92 % dari jumlah pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, disusul dengan 35,41 % berpendidikan S2, kemudian 12,5 % berpendidikan SLTA/SLTP/SD, dan 4,17 % berpendidikan D3.

Berdasarkan golongan dan pangkat, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon memiliki 1 pejabat Pimpinan Tertinggi, 6 pejabat Administrator , 15 pejabat Pengawas, 4 jabatan Fungsional Perencana, 2 jabatan Fungsional Arsiparis dan 20 Pelaksana.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.4
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana

NO	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi
1	Kendaraan Roda 4	8	Baik
2	Kendaraaa Roda 2	19	Baik
3	AC	52	46 Baik, 6 rusak
4	Lemari/Rak/ Filling Cabinet	33/14/25	baik
5	Brankas	1	Baik
6	Meja Kerja	55	Baik
7	Meja Rapat	46	44 Baik, 2 rusak
8	Kursi kerja	85	79 baik, 6 rusak
9	Kursi Rapat	235	228 baik, 7 rusak
10	Pesawat Telepon/ Fax	02-Jan	Baik
11	Komputer	57	52 baik, 2 rusak
12	Note book/ Lap top	47	41 baik, 6 rusak
13	Printer	36	26 Baik, 10 Rusak
14	Scanner	17	Baik
15	Projector	15	12 baik, 3 rusak
16	Layar	2	Baik
17	TV	7	Baik
18	Camera digital	3	Baik
19	Whiteboard	5	Baik
20	Lemari es	4	Baik
21	Finger Print	2	Baik
22	Penghancur Kertas	5	Baik
23	Vacuum Cleaner	2	Baik
24	Tabung Damkar	13	baik
25	Pompa Air	2	baik
26	Kamera Video Teleconfrence	2	baik
27	Papan Visual Elektronik	2	baik
28	Kamera Drone	1	baik

Sumber Data : Bappelitbangda, 2021

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon mempunyai peran penting di dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi dan harmonisasi bersama seluruh perangkat daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pencapaian kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon selama lima tahun periode RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

Periode Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan																			
	Indikator Kinerja Kunci																			
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA	Ada /Tidak		Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dgn PERDA/PERKAD	Ada /Tidak		Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada /Tidak		Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1	1	1	1	1
4	terakomodasinya usulan musrenbang dalam RKPD	%		90		70	75	80	85	90	80	88,6	97,77	100	100	1,14	1,31	1,22	1,17	1,11
	Indikator Kinerja Perangkat Daerah																			
1	Jumlah rumusan kebijakan hasil koordinasi yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan	%			10	12	15	10	10	10	12	14	10	12	12	1,00	0,93	1,00	1,20	1,2
2	Jumlah indikator perencanaan yang dilaksanakan	Indikator			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	1	1	1	1
3	Jumlah dokumen kerja sama daerah yang dilaksanakan	Dokumen			1	1	2	1	-	-	1	2	1	-	-	1,18	1,60	1,60	-	-
4	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan			30	11	30	30	30	30	11	30	30	30	30	1	1	1	1	1
5	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Dokumen			10	6	10	10	10	10	10	7	10	10	10	1,00	1,00	1,00	1,00	1
6	Penyusunan dan pelaksanaan RPJPD yang dilaksanakan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1
7	Penyusunan dan pelaksanaan perencanaan yang dilaksanakan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,11
8	Penyusunan dan pelaksanaan perencanaan yang dilaksanakan	100%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,12
9	Penyusunan dan pelaksanaan perencanaan yang dilaksanakan	100%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,12
	Indikator Kinerja Perangkat Daerah																			
1	Jumlah dokumen perencanaan yang dilaksanakan	Dokumen			2	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	-	-	1	1	1
2	Jumlah dokumen perencanaan yang dilaksanakan	Indikator			10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
Periode Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target SPM	Target IKK/IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan																			
1	prosentase jumlah pelayanan yang dilaksanakan sesuai SOP					-	100	100	100	100	-	100	-	-	-	-	1			
	Indikator Kinerja Kunci																			
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA	Ada		Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-	-	1	1	-	-	-
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dgn PERDA/PERKAD	Ada /Tidak		Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				1	1			
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada		Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				1	1			
	Indikator Kinerja Utama																			
1	Indeks Perencanaan Daerah	%		85		62	80	82	84	85	52,73	80,11				0,85	1,34			
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai		87		82	83	84,5	85	87	82,31	83				1	1			
3	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dilindaklanjuti SKPD	%		-		10	10	-	-	-	33,33	33,33				3,33	3,33			
4	Prosentase Hasil Inovasi Yang Dilindaklanjuti SKPD	%		-		10	10	-	-	-	38,22	10				3,82	1			
5	Prosentase pemanfaatan hasil kolaborasi	%		10		-	-	10	10	10	-	-				-	-			
	Indikator Kinerja Perangkat Daerah																			
1	ketersediaan data perencanaan pembangunan	dok				-	3	-	-	-	-	3	-			-	1			
2	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%				100	100	-	-	-	100	100				1	1			
3	prosentase jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan Kabupaten Cirebon	%				100	100	-	-	-	100	100				1	1			
4	Prosentase Meningkatnya SKPD dalam menetapkan IKU dan Parkin	%		85		100	100	-	-	-	100	100				1	1			
5	Prosentase peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah	%				-	80	80	82	85	-	80				-	1			
B	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan																			
	Indikator Kinerja Perangkat Daerah																			
1	Prosentase pemanfaatan hasil kolaborasi	%				-	-	10	10	10	-	-				-	-			

Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel 2.7, Tabel 2.8 dan Tabel 2.9

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda
Kabupaten Cirebon Tahun 2015 – 2019

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan					Rata-rata	
											Anggaran Tahun					Pertumbuhan (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Angg aran	Real isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	5.609.255.000	3.722.534.000	4.496.004.000	5.609.255.000	6.506.132.000	3.436.031.937	3.619.493.668	4.362.332.750	5.512.713.056	6.042.914.001	0,61	0,97	0,97	0,98	0,93	6,97	9,62
Belanja Pegawai	5.609.255.000	3.722.534.000	4.496.004.000	5.609.255.000	6.506.132.000	3.436.031.937	3.619.493.668	4.362.332.750	5.512.713.056	6.042.914.001	0,61	0,97	0,97	0,98	0,93	6,97	15,46
Belanja Langsung	12.468.800.204	15.022.180.917	10.307.967.100	10.474.352.200	12.381.787.850	11.576.295.985	13.678.006.863	9.140.688.998	8.959.627.917	10.607.473.698	0,93	0,91	0,89	0,86	0,86	2,23	18,39
Belanja Pegawai	1.316.586.092	1.266.264.500	1.794.190.000	797.595.000	735.054.000	1.074.024.000	1.009.962.000	1.464.341.000	585.515.105	599.501.000	0,82	0,80	0,82	0,73	0,82	-6,38	-4,65
Belanja Barang dan Jasa	9.503.681.612	8.372.654.582	7.376.461.800	8.695.389.600	10.236.002.350	9.026.806.485	7.658.433.863	6.559.726.298	7.498.349.712	8.791.656.698	0,95	0,91	0,89	0,86	0,86	2,95	0,51
Belanja Modal	1.648.532.500	5.383.261.835	1.137.315.300	981.367.600	1.410.731.500	1.475.465.500	5.009.611.000	1.116.621.700	875.763.100	1.216.316.000	0,90	0,93	0,98	0,89	0,86	44,43	44,78
BELANJA DAERAH	18.078.055.204	18.744.714.917	14.803.971.100	16.083.607.200	18.887.919.850	15.012.327.922	17.297.500.531	13.503.021.748	14.472.340.973	16.650.387.699	0,83	0,92	0,91	0,90	0,88	2,19	3,88

Sumber Data : Bappelitbangda, 2015-2019

Tabel 2.8

Anggaran, Realisasi Belanja dan Rasio Program Kegiatan
Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2015 – 2019

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Non Urusan	3.192.892.048	6.956.504.891	3.026.855.000	3.214.401.000	2.668.687.600	2.982.040.485	6.423.037.513	2.760.988.791	2.923.450.848	3.547.292.293	0,93	0,92	0,91	0,91	0,91	22,16	21,40
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.535.891.550	1.686.542.156	1.872.703.000	1.526.478.200	1.230.244.000	1.412.587.735	1.544.520.113	1.624.277.791	1.327.519.048	2.166.265.043	0,92	0,92	0,87	0,87	0,88	15,76	14,85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.060.000	369.025.000	262.200.000	274.992.000	228.492.000	131.126.934	267.577.403	117.893.104	172.926.468	163.390.564	0,87	0,73	0,45	0,63	0,72	26,23	22,32
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	9.125.000	10.000.000	11.000.000	15.000.000	15.000.000	6.027.000	6.567.600	8.117.400	10.795.000	9.484.200	0,66	0,66	0,74	0,72	0,63	13,99	13,35
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	30.000.000	170.568.000	240.000.000	-	-	29.880.000	170.568.000	239.550.000	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	127,32	127,82
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	57.000.000	60.000.000	54.250.000	54.250.000	54.250.000	57.000.000	60.000.000	54.250.000	54.250.000	33.250.000	1,00	1,00	1,00	1,00	0,61	(1,08)	(10,76)
Penyediaan Alat Tulis Kantor	44.434.300	80.268.400	66.500.000	66.468.600	66.500.000	43.569.050	79.850.000	66.393.000	66.193.000	66.345.000	0,98	0,99	1,00	1,00	1,00	15,87	16,59
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	20.000.000	17.999.900	23.200.000	23.200.000	23.200.000	20.000.000	17.999.900	23.200.000	22.146.000	23.200.000	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	4,72	4,78
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	8.097.500	24.754.800	14.000.000	14.000.000	14.000.000	6.991.000	24.754.800	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0,86	1,00	1,00	1,00	1,00	40,57	52,66
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	684.760.500	610.065.000	1.051.255.000	594.752.400	1.303.417.500	680.085.500	599.497.000	1.022.191.400	535.048.900	1.120.704.000	0,99	0,98	0,97	0,90	0,86	34,28	30,11
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	19.824.000	63.600.000	16.549.200	9.996.000	-	19.824.000	63.600.000	16.399.200	-	0,00	1,00	1,00	0,99	0,00	26,81	11,65
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU	47.528.000	40.456.000	44.898.000	44.898.000	44.898.000	31.970.000	31.686.000	41.155.500	43.641.500	43.992.500	0,67	0,78	0,92	0,97	0,98	(0,97)	8,96
Penyediaan Makanan dan Minuman	94.810.000	80.980.000	54.000.000	54.000.000	55.110.000	61.102.000	64.024.000	49.000.000	52.000.000	54.630.000	0,64	0,79	0,91	0,96	0,99	(11,46)	(1,88)

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	420.076.250	373.169.056	197.800.000	197.800.000	397.800.000	374.716.251	372.739.410	134.597.387	169.550.980	397.718.779	0,89	1,00	0,68	0,86	1,00	10,74	24,03
<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	<i>1.371.177.748</i>	<i>4.971.060.335</i>	<i>764.652.000</i>	<i>1.234.096.800</i>	<i>622.200.000</i>	<i>1.287.798.500</i>	<i>4.604.786.500</i>	<i>754.766.000</i>	<i>1.183.018.800</i>	<i>597.973.750</i>	<i>0,94</i>	<i>0,93</i>	<i>0,99</i>	<i>0,96</i>	<i>0,96</i>	<i>47,43</i>	<i>45,31</i>
Pembangunan Gedung Kantor	-	4.109.897.835	-	-	-	-	3.866.805.000	-	-	-	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	(25,00)	(25,00)
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	911.768.000	500.000.000	-	61.320.000	-	839.116.000	377.350.000	-	60.195.000	-	0,92	0,75	0,00	0,98	0,00	(61,29)	(63,76)
Pengadaan Mebeleur	-	-	-	279.000.000	100.000.000	300.802.500		-	272.550.000	98.270.000	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	(16,04)	(40,99)
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	311.529.748	215.282.500	606.000.000	704.632.800	350.000.000	-	214.982.500	597.500.000	690.928.800	328.253.750	0,00	1,00	0,99	0,98	0,94	29,14	35,27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	110.880.000	110.880.000	113.652.000	144.144.000	127.200.000	110.880.000	110.649.000	112.266.000	114.345.000	126.450.000	1,00	1,00	0,99	0,79	0,99	4,39	3,42
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	22.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	22.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,98	3,98
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,33	8,33
<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>	<i>68.313.000</i>	<i>54.935.000</i>	<i>80.000.000</i>	<i>-</i>	<i>136.243.600</i>	<i>68.313.000</i>	<i>54.635.000</i>	<i>78.625.000</i>	<i>-</i>	<i>134.809.000</i>	<i>1,00</i>	<i>0,99</i>	<i>0,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,99</i>	<i>(18,49)</i>	<i>(19,03)</i>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	38.313.000	39.935.000	60.000.000	-	62.722.000	38.313.000	39.635.000	58.625.000	-	61.773.000	1,00	0,99	0,98	0,00	0,98	(11,38)	(12,16)
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	30.000.000	15.000.000	20.000.000	-	73.521.600	30.000.000	15.000.000	20.000.000	-	73.036.000	1,00	1,00	1,00	0,00	0,99	(29,17)	(29,17)
<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	<i>154.929.750</i>	<i>150.000.000</i>	<i>235.000.000</i>	<i>243.450.000</i>	<i>250.000.000</i>	<i>154.669.750</i>	<i>128.195.000</i>	<i>231.400.000</i>	<i>219.620.000</i>	<i>237.065.000</i>	<i>1,00</i>	<i>0,85</i>	<i>0,98</i>	<i>0,90</i>	<i>0,95</i>	<i>14,94</i>	<i>16,56</i>
Bimbingan Teknis Peny. Dokumen Perenc.	154.929.750	150.000.000	235.000.000	243.450.000	250.000.000	154.669.750	128.195.000	231.400.000	219.620.000	237.065.000	1,00	0,85	0,98	0,90	0,95	14,94	16,56

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	42.580.000	63.967.400	58.000.000	110.376.000	230.000.000	40.423.500	61.476.900	55.420.000	107.793.000	227.100.600	0,95	0,96	0,96	0,98	0,99	59,90	61,85
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.580.000	50.000.000	44.000.000	50.000.000	30.000.000	28.679.000	50.000.000	43.100.000	50.000.000	29.850.000	0,94	1,00	0,98	1,00	1,00	6,29	9,06
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	6.000.000	6.988.700	7.000.000	10.263.000	13.100.000	5.744.500	6.988.700	6.160.000	9.036.000	13.100.000	0,96	1,00	0,88	0,88	1,00	22,72	25,37
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6.000.000	6.978.700	7.000.000	10.113.000	135.000.000	6.000.000	4.488.200	6.160.000	8.757.000	133.150.600	1,00	0,64	0,88	0,87	0,99	324,00	368,68
Penyusunan Pelaporan Capaian Program dan Kegiatan Triwulanan	-	-	-	40.000.000	51.900.000	-	-	-	40.000.000	51.000.000	0,00	0,00	0,00	1,00	0,98	7,44	6,88
Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	20.000.000	30.000.000	16.500.000	100.000.000	200.000.000	18.248.000	29.424.000	16.500.000	85.500.000	184.078.900	0,91	0,98	1,00	0,86	0,92	152,77	137,70
Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	20.000.000	30.000.000	16.500.000	50.000.000	100.000.000	18.248.000	29.424.000	16.500.000	40.550.000	84.328.900	0,91	0,98	1,00	0,81	0,84	77,01	67,76
Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	44.950.000	-	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	-	-
Penyusunan Pembuatan Profil Badan	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	99.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-
Urusan Penataan Ruang	1.030.915.500	919.000.000	316.425.000	-	-	1.004.004.500	894.300.500	270.896.300	-	-	0,97	0,97	0,86	0,00	0,00	-	-
Program Perencanaan Tata Ruang	885.957.500	805.000.000	237.515.000	-	-	867.271.500	783.642.500	192.152.900	-	-	0,98	0,97	0,81	0,00	0,00	-	-
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang	810.845.000	-	-	-	-	797.559.000	-	-	-	-	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW	-	650.000.000	-	-	-	-	640.577.500	-	-	-	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	-	-
Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	75.112.500	155.000.000	79.930.000	-	-	69.712.500	143.065.000	79.541.400	-	-	0,93	0,92	1,00	0,00	0,00	-	-
<i>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</i>	<i>144.958.000</i>	<i>114.000.000</i>	<i>78.910.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>136.733.000</i>	<i>110.658.000</i>	<i>78.743.400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,94</i>	<i>0,97</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	144.958.000	114.000.000	78.910.000	-	-	136.733.000	110.658.000	78.743.400	-	-	0,94	0,97	1,00	0,00	0,00	-	-
Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan	8.244.992.656	7.146.676.026	6.764.687.100	6.445.751.200	7.390.680.750	7.590.251.000	6.360.668.850	5.949.548.385	5.273.905.646	6.205.068.682	0,92	0,89	0,88	0,82	0,84	-	-
<i>Program Pengembangan Data/Informasi</i>	<i>1.459.010.592</i>	<i>810.285.500</i>	<i>1.384.279.400</i>	<i>451.130.000</i>	<i>532.818.900</i>	<i>1.392.842.400</i>	<i>757.928.400</i>	<i>1.325.724.100</i>	<i>432.249.939</i>	<i>504.048.707</i>	<i>0,95</i>	<i>0,94</i>	<i>0,96</i>	<i>0,96</i>	<i>0,95</i>	<i>(5,73)</i>	<i>(5,36)</i>
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	881.600.000	361.867.500	983.950.000	250.000.000	299.994.400	864.095.000	350.005.400	969.737.900	239.277.939	288.254.415	0,98	0,97	0,99	0,96	0,96	14,59	15,68
Statistik Daerah	446.986.792	-	-	-	-	421.409.400	-	-	-	-	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	(25,00)	(25,00)
Pengolahan Informasi Database Pembangunan Kab.Cirebon	-	206.300.000	200.000.000	150.000.000	170.000.000	-	203.644.000	195.080.000	147.475.000	168.231.000	0,00	0,99	0,98	0,98	0,99	(3,68)	(3,63)
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	130.423.800	242.118.000	200.329.400	51.130.000	62.824.500	107.338.000	204.279.000	160.906.200	45.497.000	47.563.292	0,82	0,84	0,80	0,89	0,76	4,19	0,47
<i>Program Kerjasama Pembangunan</i>	<i>100.000.000</i>	<i>208.000.000</i>	<i>52.228.000</i>	<i>219.132.000</i>	<i>74.151.500</i>	<i>-</i>	<i>183.435.000</i>	<i>32.578.000</i>	<i>42.822.000</i>	<i>49.326.500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,88</i>	<i>0,62</i>	<i>0,20</i>	<i>0,67</i>	<i>71,63</i>	<i>(8,90)</i>
Sinergitas Perencanaan Pembangunan	100.000.000	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	-

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	-	50.000.000	52.228.000	69.132.000	74.151.500	-	34.750.000	32.578.000	42.822.000	49.326.500	0,00	0,70	0,62	0,62	0,67	11,02	10,10
Koordinasi Kerjasama Investasi Daerah	-	158.000.000	-	-	-	-	148.685.000	-	-	-	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	(25,00)	(25,00)
<i>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</i>	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	95.089.935	99.858.000	0,00	0,00	0,00	0,95	1,00	-	1,25
Penyu. Perenc.Pengemb. Perbatasan	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	95.089.935	99.858.000	0,00	0,00	0,00	0,95	1,00	-	1,25
<i>Program Perenc. Pengemb. Will.Strategis dan Cepat Tumbuh</i>	900.150.000	-	-	150.000.000	300.000.000	859.267.000	-	-	140.505.000	218.783.398	0,95	0,00	0,00	0,94	0,73	-	(11,07)
Penyusunan Perencanaan Masterplan Drainase	500.075.000	-	-	-	-	493.402.500	-	-	-	-	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	(25,00)	(25,00)
Penyusunan Perencanaan Masterplan Pengelolaan Limbah	400.075.000	-	-	-	-	365.864.500	-	-	-	-	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	(25,00)	(25,00)
Sos. Kebij. Pemerintah dlm Pengemb. Wil Strategis dan Cepat Tumbuh	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	140.505.000	-	0,00	0,00	0,00	0,94	-	-	-
Koord. penetapan rencana pengembangan will. strategis dan cepat tumbuh	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	82.526.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	-	-
Peny. Perenc. pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	136.256.598	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	-	-
<i>Program Perenca. Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar</i>	142.640.800	78.422.000	350.000.000	650.000.000	650.000.000	136.378.300	76.172.000	340.088.900	626.352.812	626.589.704	0,96	0,97	0,97	0,96	0,96	96,75	96,63

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	-	-	-	350.000.000	350.000.000	-	-	-	337.580.750	336.809.600	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96	-	(0,06)
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	142.640.800	78.422.000	350.000.000	300.000.000	300.000.000	136.378.300	76.172.000	340.088.900	288.772.062	289.780.104	0,96	0,97	0,97	0,96	0,97	71,75	71,90
<i>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>3.136.610.064</i>	<i>3.038.445.876</i>	<i>2.507.969.700</i>	<i>1.809.675.000</i>	<i>2.197.810.350</i>	<i>2.910.502.800</i>	<i>2.505.092.300</i>	<i>2.075.563.870</i>	<i>1.371.004.577</i>	<i>1.664.683.861</i>	<i>0,93</i>	<i>0,82</i>	<i>0,83</i>	<i>0,76</i>	<i>0,76</i>	<i>(6,75)</i>	<i>(10,90)</i>
Penyusunan Rancangan RPJMD	-	-	-	505.150.000	-	-	-	-	285.706.250	-	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	-	-
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	798.500.000	964.600.000	731.571.000	623.025.000	665.150.000	747.800.000	942.870.000	689.447.600	565.869.602	551.457.152	0,94	0,98	0,94	0,91	0,83	(2,86)	(5,32)
Penetapan RKPD	274.255.600	398.602.100	335.508.300	293.759.800	319.861.450	188.255.600	190.929.100	282.685.600	239.110.875	257.495.054	0,69	0,48	0,84	0,81	0,81	6,49	10,44
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawabann (LKPJ)	180.520.000	199.500.000	189.313.500	-	-	178.520.000	167.418.000	181.813.500	-	-	0,99	0,84	0,96	0,00	0,00	-	-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaks.Rencana Pemb. Daerah	483.447.664	349.934.776	260.046.900	100.000.000	145.711.400	459.007.700	144.834.700	198.101.500	72.227.650	101.799.000	0,95	0,41	0,76	0,72	0,70	(17,28)	(13,57)
Perjanjian Kinerja	67.737.000	150.000.000	149.442.500	29.000.000	67.127.500	67.737.000	149.770.000	149.142.500	29.000.000	32.827.500	1,00	1,00	1,00	1,00	0,49	42,99	13,33
Penyusunan Laporan Ikhtisar Kinerja SKPD	146.600.000	196.609.000	167.880.000	-	-	146.600.000	189.523.000	167.594.670	-	-	1,00	0,96	1,00	0,00	0,00	-	-
Evaluasi RPJMD	-	-	245.600.000	-	-	-	-	33.429.800	-	-	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	-	-
Peny. RPJMD	199.453.300	-	-	-	717.360.000	187.165.500	-	-	-	535.539.755	0,94	0,00	0,00	0,00	0,75	-	-
Penetapan RKPD Perubahan	67.639.750	75.000.000	76.490.000	54.075.000	73.255.000	56.418.750	74.700.000	72.165.000	45.525.000	38.737.000	0,83	1,00	0,94	0,84	0,53	4,76	(5,70)
Penyusunan KUA PPAS	107.530.750	185.000.000	159.047.500	143.364.200	144.820.000	97.990.750	142.400.000	112.023.700	86.564.200	95.221.400	0,91	0,77	0,70	0,60	0,66	12,29	2,82
Penyusunan KUA PPAS Perubahan	64.132.000	70.000.000	68.070.000	61.301.000	64.525.000	57.286.000	66.500.000	64.350.000	47.001.000	51.607.000	0,89	0,95	0,95	0,77	0,80	0,43	(1,08)
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	-	-	125.000.000	-	-	-	-	124.810.000	-	-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kajian Wilayah Perbatasan	215.794.000	-	-	-	-	199.179.000	-	-	-	-	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Kajian Geoteknik	481.000.000	-	-	-	-	474.792.500	-	-	-	-	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Sistem Informasi Database Pembangunan	50.000.000	-	-	-	-	49.750.000	-	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Kajian Geostrategis Pengembangan Wilayah	-	250.000.000	-	-	-	-	243.990.000	-	-	-	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	-	-
Penyusunan Daya Saing Daerah	-	199.200.000	-	-	-	-	192.157.500	-	-	-	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	-	-
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	724.820.500	987.174.650	762.950.000	1.300.802.000	1.835.900.000	686.085.500	916.292.650	705.503.215	1.169.381.846	1.453.519.162	0,95	0,93	0,92	0,90	0,79	31,28	25,15
Koordinasi Pengentasan Kemiskinan	50.000.000	262.500.000	-	-	-	50.000.000	233.548.000	-	-	-	1,00	0,89	0,00	0,00	0,00	81,25	66,77
Seminar Perencanaan Pembangunan Wilayah Pesisir	200.000.000	-	-	-	-	197.550.000	-	-	-	-	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Penghitungan Neraca Bahan Makanan	250.000.000	-	-	-	-	249.400.000	-	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	-	-	400.000.000	-	300.000.000	-	-	375.219.950	-	253.121.600	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	-	-
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	-	200.000.000	249.000.000	-	-	-	194.585.000	220.142.000	-	-	0,00	0,97	0,88	0,00	0,00	-	-
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	224.820.500	324.674.650	113.950.000	190.862.000	260.000.000	189.135.500	292.504.650	110.141.265	132.712.530	215.884.142	0,84	0,90	0,97	0,70	0,83	20,81	3,20
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Agribisnis	-	-	-	263.400.000	-	-	-	-	249.830.500	-	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	-	-
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Sektor Perikanan	-	-	-	238.415.000	350.000.000	-	-	-	223.787.500	338.060.000	0,00	0,00	0,00	0,94	0,97	11,70	12,77
Penyusunan Masterplan Sistem Logistik Daerah	-	-	-	282.400.000	-	-	-	-	265.952.316	-	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	(25,00)	(25,00)

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Review Rencana Induk Perencanaan Pariwisata Daerah	-	-	-	325.725.000	375.900.000	-	-	-	297.099.000	122.245.000	0,00	0,00	0,00	0,91	0,33	3,85	(14,71)
Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Peternakan	-	-	-	-	250.000.000	-	-	-	-	229.138.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	-	-
Review Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan	-	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	295.069.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	-	-
Perencanaan Pengembangan Mangrove	-	200.000.000	-	-	-	-	195.655.000	-	-	-	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	-	-
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	839.132.200	1.675.460.000	1.707.260.000	1.565.012.200	1.500.000.000	691.689.500	1.574.420.500	1.470.090.300	1.199.324.105	1.409.267.000	0,82	0,94	0,86	0,77	0,94	22,27	30,02
Koordinasi Perenc. Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	179.677.200	200.000.000	202.500.000	300.000.000	300.000.000	169.840.000	196.880.000	178.323.000	269.902.800	279.250.000	0,95	0,98	0,88	0,90	0,93	15,18	15,33
Penunjang Program Cirebon Kabupaten Sehat	250.880.000	-	-	-	-	239.739.000	-	-	-	-	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Perencanaan PKH	214.900.000	-	-	-	-	117.078.000	-	-	-	-	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Kajian Study Kelayakan Pembangunan RSUD	193.675.000	-	-	-	-	165.032.500	-	-	-	-	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Peny. Profil Sosial Budaya	-	119.380.000	-	-	-	-	105.170.000	-	-	-	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	-	-
analisis sarana dan prasarana pendidikan dasar	-	249.730.000	-	-	-	-	236.175.000	-	-	-	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	-	-
Analisis sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar	-	192.150.000	-	-	-	-	184.597.500	-	-	-	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	-	-
Masterplan pembangunan di bidang pemerintahan	-	571.200.000	-	-	-	-	515.065.000	-	-	-	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	-	-
Kajian Budaya Daerah	-	343.000.000	-	-	-	-	336.533.000	-	-	-	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dukungan Manajemen Bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	-	-	258.410.000	460.000.000	400.000.000	-	-	249.736.000	273.000.000	382.300.400	0,00	0,00	0,97	0,59	0,96	16,24	12,34
Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan	-	-	200.000.000	-	-	-	-	185.896.000	-	-	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	-	-
Penyusunan Strategi Pencapaian SDG's	-	-	196.350.000	-	-	-	-	184.945.000	-	-	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	-	-
Kegiatan Pro Poor, Planning, Budgetting (P3B) dan PPRG	-	-	750.000.000	315.012.200	-	-	-	583.100.300	288.710.305	-	0,00	0,00	0,78	0,92	0,00	(39,50)	(37,62)
Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten Cirebon	-	-	100.000.000	200.000.000	100.000.000	-	-	88.090.000	88.425.000	97.315.000	0,00	0,00	0,88	0,44	0,97	12,50	2,61
Pemb. dan pengembangan data perencanaan pemerintahan sosial budaya	-	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-	371.993.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	-	-
Kajian Peningkatan Kapasitas Desa dan Pengembangan Produk Unggulan Setiap Desa	-	-	-	290.000.000	300.000.000	-	-	-	279.286.000	278.408.500	0,00	0,00	0,00	0,96	0,93	0,86	(0,08)
<i>Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah</i>	-	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Sinergitas Data Pembangunan Dalam Meningkatkan IPM	-	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah</i>	252.628.500	248.888.000	-	-	-	252.628.500	247.328.000	-	-	-	1,00	0,99	0,00	0,00	0,00	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	252.628.500	248.888.000	-	-	-	252.628.500	247.328.000	-	-	-	1,00	0,99	0,00	0,00	0,00	-	-
Program Perenc.Prasarana Wil. dan SDA	690.000.000	-	-	200.000.000	200.000.000	660.857.000	-	-	197.175.432	178.992.350	0,96	0,00	0,00	0,99	0,89	-	-
Pengembangan Potensi Wilayah Pertambangan	690.000.000	-	-	-	-	660.857.000	-	-	-	-	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fis Pra	-	-	-	200.000.000	200.000.000	-	-	-	197.175.432	178.992.350	0,00	0,00	0,00	0,99	0,89	-	(2,31)
Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	-	200.000.000	814.200.000	1.100.000.000	-	-	159.255.522	762.271.423	855.112.723	0,00	0,00	0,80	0,94	0,78	85,55	97,71
Program Penelitian, Pengem.dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK Daerah	-	-	200.000.000	614.200.000	600.000.000	-	-	159.255.522	581.998.423	597.587.723	0,00	0,00	0,80	0,95	1,00	51,20	67,03
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	-	-	-	200.000.000	200.000.000	-	-	-	188.907.390	197.880.900	0,00	0,00	0,00	0,94	0,99	-	-
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	92.274.786	-	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	-	-
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Energi Alternatif	-	-	-	94.200.000	-	-	-	-	81.599.963	-	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	-	-
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	-	-	-	220.000.000	300.000.000	-	-	-	219.216.284	300.000.000	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-	-
Seminar Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Pertanian	-	-	100.000.000	-	-	-	-	85.085.522	-	-	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	-	-	100.000.000	-	-	-	-	74.170.000	-		0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	-	-
Peningkatan Koordinasi Penelitian Pengembangan Daerah			-	-	100.000.000	-	-	-	-	99.706.823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Monitoring dan Evaluasi Penelitian Pembangunan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>Program Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Daerah</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>200.000.000</i>	<i>500.000.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>180.273.000</i>	<i>257.525.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,90</i>	<i>0,52</i>	<i>37,50</i>	<i>-</i>
Penelitian &Pengembangn Bidang Sosial	-	-	-	100.000.000	200.000.000	-	-	-	93.452.000	199.950.000	0,00	0,00	0,00	0,93	1,00	25,00	-
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	-	-	-	100.000.000	300.000.000	-	-	-	86.821.000	57.575.000	0,00	0,00	0,00	0,87	0,19	50,00	-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG	12.468.800.204	15.022.180.917	10.307.967.100	10.474.352.200	12.381.787.850	11.576.295.985	13.678.006.863	9.140.688.998	8.959.627.917	10.607.473.698	0,93	0,91	0,89	0,86	0,86	2,23	0,35

Sumber Data : Bappelitbangda, 2021

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda
Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2021

Realisasi Anggaran pada Tahun		Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan (%)	
Uraian	2019	Uraian	2020	2021	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
Belanja Tidak Langsung	6.042.914.001	Belanja Operasi	13.509.230.700	15.907.592.435	12.216.611.175	14.438.496.434	0,90	0,91	7,54	7,69
Belanja Pegawai	6.042.914.001	Belanja Pegawai	7.429.179.000	7.416.320.000	6.443.538.456	6.886.304.476	0,87	0,93	-0,09	3,21
		Belanja Barang dan Jasa	6.080.051.700	8.491.272.435	5.773.072.719	7.552.191.958	0,95	0,89	14,20	11,78
Belanja Langsung	10.607.473.698	Belanja Modal	860.250.000	356.672.000	857.365.000	327.752.100	1,00	0,92	-70,59	-80,79
Belanja Pegawai	599.501.000	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	860.250.000	356.672.000	645.717.000	327.752.100	0,75	0,92	-70,59	-48,51
Belanja Barang dan Jasa	8.791.656.698	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	211.648.000	-	-	-	-	-
Belanja Modal	1.216.316.000									-
BELANJA DAERAH	16.650.387.699	BELANJA DAERAH	14.369.480.700	16.264.264.435	13.073.976.175	14.766.248.534	0,91	0,91	5,82	5,73

Sumber Data : Bappelitbangda, 2019-2021

Berdasarkan data Tabel 2.7 di atas, terlihat bahwa rata-rata anggaran Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) naik 6,97 % untuk setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi 9,62 %, sedangkan untuk Belanja Langsung rata-rata 2,23 % setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi rata-rata 18,39 % per tahun. Pada Belanja Langsung terjadi penurunan, hal tersebut dikarenakan untuk belanja pegawai adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mengurangi belanja pegawai sejak tahun 2016 dan pada tahun 2018 sudah diterapkan aplikasi e-kinerja sehingga belanja pegawai pada belanja langsung hanya dianggarkan untuk kegiatan yang mengundang narasumber/instruktur/staf ahli di luar SKPD bersangkutan.

Berdasarkan Tabel 2.8 kita dapat melihat perkembangan pendanaan program di Bappelitbangda Kabupaten Cirebon. Jika dilihat per program, rasio realisasi terhadap anggaran mengalami fluktuasi. Non urusan rasio realisasi dan anggaran berkisar 0,91-0,93 hal tersebut menunjukkan untuk mencapai output tergolong tinggi, Penunjang Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan berkisar 0,82-0,92 hal tersebut juga menunjukkan tingkat pencapaian output relatif tinggi. Untuk penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan rasio realisasi penyerapan anggaran hanya dua tahun dikarenakan penunjang urusan tersebut baru ada di Bappelitbangda Kabupaten Cirebon pada tahun 2017. Sedangkan untuk Urusan Penataan Ruang sejak tahun 2018 sudah menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan Tabel 2.9 pada tahun anggaran 2021 terjadi perubahan pengelompokan uraian belanja sesuai dengan Permendagri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pada tabel tersebut untuk Belanja Daerah pengelompokannya sudah berubah dari Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Belanja Modal menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA

2.4.1 Tantangan

Tujuan dari perencanaan adalah tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon masih jauh dari rata-rata Provinsi Jawa Barat, diantaranya adalah aspek angka

kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Tiga tahun terakhir kemiskinan Kabupaten Cirebon pada angka 10,20 % pada tahun 2019; 11,24 % pada tahun 2020 dan 12,30 % pada tahun 2021. Sedangkan indeks pembangunan manusia pada angka 68,61 pada tahun 2019; 68,75 pada tahun 2020 dan 69,12 pada tahun 2021.

Di tengah tantangan revolusi industri 4.0, Indonesia dan seluruh dunia dihadapkan pada adanya *pandemic Covid-19* sejak akhir tahun 2019, sehingga memaksa semua pihak untuk mampu beradaptasi, salah satunya dalam sektor pendidikan mengharuskan siswa melakukan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh), peningkatan angka pengangguran dan peningkatan masyarakat miskin.

Keberhasilan perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan Kabupaten Cirebon yang baik dan tepat sasaran, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM perencana sektoral yang kompeten untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan. Jumlah SDM perencana sektoral di Kabupaten Cirebon masih sedikit. Pada tahun 2021 telah dilantik 3 orang fungsional perencana dan 1 orang CPNS Perencana, namun perlu ditambah kuantitasnya sehingga dapat meningkatkan kinerja semua sektor pembangunan. Selain itu pengembangan kompetensi perencana dapat diperoleh melalui kegiatan workshop, bimbingan teknis dan diklat secara berkala atau regular yang sesuai dengan kualifikasi perencana.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Selanjutnya diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Cirebon sehingga tercipta rasa memiliki "*sense of belonging*" terhadap pembangunan daerah. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Bappelitbangda ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas, harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat sehingga setiap seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses perencanaan.

2.4.2 Peluang

Globalisasi yang merupakan faktor eksternal/internasional semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia termasuk Kabupaten Cirebon, seperti cara pandang tentang demokrasi, perdagangan dan perkembangan teknologi (IT). Secara positif, globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan internasional.

Perencanaan pembangunan daerah harus melihat globalisasi sebagai satu peluang baik untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab peluang tersebut dibutuhkan kompetensi perencana pembangunan daerah yang sensitive terhadap perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah di masa yang akan datang. Peningkatan kapasitas SDM perencana juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Hal ini didukung pula oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta perencanaan infrastruktur dan kewilayahan; dan
- c. penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

- 1). Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna, serta belum optimalnya kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi, kemauan masyarakat, dan inisiatif dari pemerintah daerah.
- 2). Belum optimalnya kualitas program kegiatan pembangunan. Masalah tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya penggunaan data kinerja sebagai bahan perencanaan, serta belum adanya pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1). **BERBUDAYA**

Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat;

2). **SEJAHTERA**

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.;

3). **AGAMIS**

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika;

4). **MAJU**

Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

5). **AMAN**

Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional

Ke lima Misi tersebut memiliki tujuan dengan masing-masing sasaran sebagai berikut :

Misi Pertama, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.

Tujuan : Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat
2. Berkembangnya sektor wisata berbasis budaya.

Misi Kedua, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

Tujuan : Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera

Sasaran : 1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3. Menurunnya angka kemiskinan
4. Menurunnya angka pengangguran
5. Meningkatnya prestasi olahraga dan peranan pemuda dalam pembangunan

Misi Ketiga, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.

Tujuan : Meningkatkan keshalehan sosial dan kerukunan antar dan inter umat beragama

Sasaran: 1. Menurunnya kegiatan asusila di masyarakat
2. Menurunnya pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama

Misi Keempat, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Tujuan 1: Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Sasaran : 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.
2. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
3. Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Tujuan 2: Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa

Sasaran : 1. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih
3. meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik
4. meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa

Misi Kelima, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Tujuan 1 : meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

Sasaran : 1. Meningkatnya ketertiban umum
2. Menurunnya resiko bencana

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2019-2024 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon maka fungsi dan tugas Bappelitbangda Kabupaten Cirebon terkait erat dengan pencapaian misi ke-4, yaitu **“Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah”**.

Tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

Tujuan 2 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran : 1. Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Kabupaten Cirebon yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 4 Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah	1. Kurangnya SDM Perencana 2. Kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja yang terintegrasi 3. Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail untuk melakukan perencanaan	Belum optimalnya perencanaan yang berprinsip pada transformasi birokrasi	• Penggunaan IT yang telah terintegrasi • Pelaksanaan diklat teknis terkait perencanaan
		masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi pembangunan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis dan transparan	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pelayanan (perencanaan, monitoring dan pelaporan)	Pola pembangunan partisipatif telah banyak digunakan didalam berbagai perencanaan pembangunan
		Belum optimalnya pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan bidang Fisik dan Prasarana, bidang Ekonomi, bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, bidang Penelitian dan Pengembangan, dalam rangka menguatkan tata pemerintahan yang bersih dan efektif	Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis teknologi informasi

3.3

TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DAN RENSTRA BAPPEDA PROPINSI JAWA BARAT

3.3.1

Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Pemerintah Pusat yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, yaitu menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional dan mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Tugas penting Kementerian PPN/Bappenas lainnya adalah membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan atau peraturan yang selama ini masih belum terintegrasi dengan baik.

Tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan Nasional.

Tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi dengan didukung 4 faktor utama yaitu perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2025, Bappenas telah menyusun Rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas.

Visi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 adalah "Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa ;
- 2) Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia;
 - b. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan;
 - c. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel efektif dan efisien.

Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020 - 2025 tersebut, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk kedua tujuan Kementerian PPN/Bappenas periode 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

- (1) Sasaran strategis dari tujuan pertama "Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia ", yaitu terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi

perencanaan pembangunan nasional dan terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

- (2) Sasaran strategis dari tujuan kedua "Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan", yaitu terwujudnya kebijakan pembangunan nasional visioner.
- (3) Sasaran strategis dari tujuan ketiga "Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel efektif dan efisien", yaitu terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan professional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Ditinjau dari sasaran strategis Kementrian PPN/Bappenas tersebut diatas, maka sasaran strategis Kementrian PPN/Bappenas yang memiliki keselarasan dengan pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon adalah sasaran strategis pertama dan kedua yaitu "terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional"

Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMN tersebut, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk kedua tujuan Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

- (1) Sasaran strategis dari tujuan pertama "Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel", yaitu dilaksanakannya rencana pembangunan nasional yang diukur dari Persentase (%) rencana pembangunan nasional yang dilaksanakan
- (2) Sasaran strategis dari tujuan kedua "Terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di kementerian PPN/Bappenas", yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN /Bappenas yang diukur dari Tingkat tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas. Ditinjau dari sasaran strategis Kementrian PPN/Bappenas tersebut diatas, maka sasaran strategis Kementrian PPN/Bappenas yang memiliki keselarasan dengan pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon adalah sasaran strategis pertama yaitu "Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel"

Berdasarkan penelahaan terhadap sasaran strategis Kementrian PPN/Bappenas dan permasalahan pelayanan pada Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dapat diidentifikasi faktor RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, faktor penghambat dan pendorong pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon terhadap Renstra kementrian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
 Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kab. Cirebon	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel yaitu dilaksanakannya rencana pembangunan nasional yang diukur dari Persentase (%) rencana pembangunan nasional yang dilaksanakan	Tercapainya peningkatan kinerja aparatur Bappeda	Masih terdapat peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah	Adanya regulasi yang tumpang tindih di antara kementerian lembaga di pemerintah pusat, antara pusat dan daerah	komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
		Tersedianya sarana dan prasarana serta SOP pelayanan Bappeda		Belum optimalnya pelaksanaan SOP (<i>Standard Operating Procedure</i>) perencanaan	Tersedianya regulasi penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pengendalian
					Adanya Anggaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia
		Tercapainya koordinasi dan sinergitas perencanaan	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber daya aparatur perencana	Koordinasi antar stakeholder perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon yang belum optimal	Adanya partisipasi aktif dari stakeholder dalam proses perencanaan
		Tercapainya satu data dan informasi pembangunan Jawa Barat.	Belum seluruhnya data base tersedia sebagai data pendukung perencanaan	Masih kurangnya pemahaman tentang sistem perencanaan	Adanya Kebijakan pemerintah pusat dalam hal pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang cenderung meningkat untuk proporsi daerah
				Masih kurangnya tenaga fungsional perencana dan peneliti	
				Kompleksitas data/informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, sementara data yang tersedia masih kurang akurat/perlu akurasi data antar instansi	
2.	Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/ Bappenas			Koordinasi internal Belum optimal	Pengiriman SDM Bappelitbangda Kabupaten Cirebon untuk mengikuti pendidikan yang difasilitasi Pusbindiklatren

Sumber Data : Bappelitbangda, 2021

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Bappeda Propinsi Jawa Barat

Dalam pembagian wilayah kerja koordinasi Kabupaten Cirebon masuk dalam Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning yang mencakup Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon. Wilayah ini merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkan dalam sektor agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan, dan pariwisata, permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

- a. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan serta air bersih;
 - b. Perlunya peningkatan penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular;
 - c. Belum optimalnya pengembangan agribisnis;
 - d. Perlunya peningkatan sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan
- Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon menyusun faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi. Hasil identifikasi faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kab. Cirebon	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tercapainya peningkatan kinerja aparatur Bappeda	Jumlah SDM yang terbatas, belum adanya tenaga fungsional perencana dan peneliti yang bersertifikasi	Minat untuk berkarir sebagai pejabat fungsional perencana dan peneliti rendah	Kebijakan kepegawaian Pemerintah Kabupaten Cirebon mendukung terhadap pejabat fungsional
2	Tersedianya sarana dan prasarana erta SOP pelayanan Bappeda	Belum maksimal dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Padatnya volume pekerjaan Bappelitbangda membuat faktor-faktor pendukung kinerja terabaikan	Dorongan stakeholders akan produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi pemb. yang berkualitas, transparan dan partisipatif
3	Tercapainya koordinasi dan sinergitas perencanaan	Perlu optimalisasi koordinasi dan sinergitas perencanaan	Ketatnya jadwal penyusunan dokumen perencanaan	Koordinasi yang sudah terjalin baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat
4	Tercapainya satu data dan informasi pembangunan Jawa Barat	Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan sehingga data dan sumber data masih beragam;	Sumber data masih beragam	kerjasama kelembagaan antara Bappelitbangda dengan BPS

Sumber Data : Bappelitbangda, 2021

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Cirebon dengan mendasarkan pada rencana struktur dan pola ruang wilayah.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Menelaah tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Bappelitbangda. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappelitbangda yang dapat mempengaruhi pencapaian capaian kinerja tata ruang daerah akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Bappelitbangda.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Implikasi RTRW	Permohonan Rekomendasi tata ruang dari masyarakat belum sepenuhnya Berpedoman pada dokumen RTRW	Belum ditetapkan peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	BAPPELITBANGDA selaku tim BKPRD mempunyai kewenangan dalam mengoordinasikan Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang
2.	Sebagian besar sarana prasarana pendukung pusat agropolitan telah tersedia	Aspek sosial pengadaan lahan belum memungkinkan untuk membangun kelengkapan sarana	Ketentuan spasial yang detail belum dijadikan prioritas.	Komitmen pemerintah untuk menyusun ketentuan spasial yang detail
3.	Sebagian besar sarana prasarana pendukung pusat minapolitan telah terbangun PPI Gebang	Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail	Ketentuan spasial yang detail belum dijadikan prioritas.	Komitmen pemerintah untuk menyusun ketentuan spasial yang detail
4.	Kawasan peruntukan industri belum banyak dimanfaatkan oleh investor	Kurangnya data untuk mendukung promosi investasi, kurangnya dukungan masyarakat terhadap kawasan peruntukan industri	Belum lengkapnya dokumen yang berkaitan dengan kawasan peruntukan industri, kurangnya sosialisasi	Komitmen pemerintah untuk menyusun ketentuan spasial yang detail
5.	Kawasan peruntukan pertambangan telah banyak ikembangkan menjadi usaha pertambangan	Rusaknya jalan yang menjadi akses usaha pertambangan	Kurangnya pengaturan akses	Penentuan jalan alternatif khusus untuk pertambangan
6.	Kawasan pariwisata belum dikembangkan sesuai potensinya	Kurangnya pendampingan secara intensif terhadap pengembangan kawasan baik pemenuhan kebutuhan sarana, SDM pengelola dan manajemen pengelolaan	Kurang optimalnya kinerja Perangkat Daerah dan Belum lengkapnya dokumen yang berkaitan dengan kawasan peruntukan pariwisata	Komitmen pemerintah untuk menyusun ketentuan spasial yang detail dan pendampingan secara intensif terhadap pengembangan kawasan

Sumber Data : Bappelitbangda, 2021

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan

partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

- a. identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- b. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- d. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang
- e. antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
- f. peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;
- g. aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan. Beberapa hasil penyusunan perencanaan berupa Kebijakan, Rencana dan Program dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kabupaten Cirebon sebagai mana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5
 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi BAPPELITBANGDA	Permasalahan Pelayanan BAPPELITBANGDA	Faktor yang Mempengaruhi	
		Permasalahan	Pendorong
1	2	3	4
program perencanaan tata ruang mempertimbangkan penyesuaian alokasi ruang dengan daya dukung dan daya tampung	Masih rendahnya koordinasi antar pemangku kepentingan terkait penyusunan KLHS	Minimnya data dan informasi pendukung yang terkait dengan KLHS	Sudah adanya sistem peta berbasis citra dan Perda rencana tata ruang
		Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di dalam penyusunan KLHS	Adanya UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Permasalahan lingkungan hidup dan sosial (konflik lahan) telah terjadi, sehingga KLHS hanya mampu memitigasi dampak negatif tersebut		Adanya Perda No.7 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Cirebon

Sumber Data : Bappelitbangda, 2021

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dari hasil analisis kinerja pelayanan 5 (lima) tahun yang lalu serta telaahan visi dan misi kepala daerah, Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat, Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, RTRW dan kajian KLHS dapat diidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas BAPPELITBANGDA

Isu strategis bagi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang

menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon di masa lima tahun mendatang, ada 2 (dua) permasalahan inti di Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, yaitu:

Tabel 3.6
Isu-Isu Strategis

No	Urusan	Isu Strategis
1.	Perencanaan Pembangunan	Semakin besarnya tuntutan system perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif & transparan berbasis IT
		Upaya penguatan melalui Bimtek dan pengembangan kapasitas individu, lembaga dan sistem.
		Adanya kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap perencanaan pembangunan.
		Adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan non formal lainnya.
		Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan.
		Pemerintah Pusat mendorong untuk percepatan integrasi sistem informasi.
		Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan.
		Sistem Informasi yang ada belum terkelola dengan baik.
		Penguatan Sinergitas perencanaan pembangunan yang belum terjalin lintas sektor, terutama dengan pihak perguruan tinggi masih perlu ditingkatkan.
2.	Penelitian dan Pengembangan	kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan apabila dilengkapi dengan masukan dan rekomendasi yang diangkat dari hasil penelitian dan pengembangan yang terfokus, teliti dan inovatif.

Sumber Data : Bappelitbangda, 2021

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (*lima*) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bappelitbangda maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2019–2024 yang menjadi tugas Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja 2020	Bobot kinerja	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke- (%)				
							1	2	3	4	5
1	meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	Rata-rata persentase ketercapaian indikator sasaran daerah yang memenuhi target	46,21 %	20%	60	60	60	60	60
				Rata-rata persentase ketercapaian indikator sasaran SKPD	61,65 %	30%	60	65	70	75	80
				Rata-rata persentase ketercapaian kinerja program	55,66 %	50%	70	75	80	85	90
				Indeks perencanaan daerah	52,73 %	100 %	62	60	80	82	85
			Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,05	100	82,00	83,00	84,50	85,00	87,00
2	meningkatkan kinerja Penelitian dan Pengembangan serta inovasi daerah	hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti SKPD	33,33	10	10	10	-	-	-
			Meningkatnya Inovasi daerah	Prosentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti SKPD	36,22	10	10	10	-	-	-
			Meningkatnya implementasi rencana kelitbangan daerah	Prosentase Implementasi Rencana Kelitbangan Daerah	-	10	-	-	10	10	10

Sumber Data : Bappelitbangda, 2021

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2019)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
			2020	2021	2022	2023	2024	
I	Nilai AKIP	B	B	B	B	B	BB	BB
2	IKM	78,05	82	83	84,50	85	87	87

Sumber Data : Bappelitbangda, 2021

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja (2020)	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
			2020	2021	2022	2023	2024	
I	Pelayanan Umum	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
I.a	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
I.a.1	Perencanaan							
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	tersedia	tersedia	tersedia	-	-	-	tersedia
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	tersedia	tersedia	tersedia	-	-	-	tersedia
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	tersedia	tersedia	tersedia	-	-	-	tersedia
4	ketersediaan data perencanaan pembangunan	tersedia	tersedia	tersedia	-	-	-	tersedia
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	100 %	100 %	-	-	-	100 %
6	prosentase jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan Kabupaten Cirebon	100 %	100 %	100 %	-	-	-	100 %
7	Prosentase Meningkatnya SKPD dalam menetapkan IKU dan Perkin	100	100	100	-	-	-	100
8	Prosentase peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah	-	-	80	80	82	85	85

9	Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	80	95	96	97	97
10	Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	73	75	80	85	85
11	Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang perekonomian dan SDA	-	-	75	80	85	90	90
1.a.2	Penelitian dan Pengembangan							
1	prosentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti SKPD	-	-	10	-	-	-	10
2	prosentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti SKPD	-	-	10	-	-	-	10
3	Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	-	-	10	10	10	10

Sumber Data : Bappelitbangda, 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity and treats*).

Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu- isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Hasil analisis SWOT dalam menentukan alternatif strategi pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon di sajikan pada Tabel 5.1.

Merujuk pada alternatif strategi tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan pembangunan dengan berdasarkan pada *balanced score card* melalui empat perspektif yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan dan perspektif penganggaran. Definisi dari 4 (empat) perspektif tersebut adalah :

- 1) Perspektif masyarakat adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan obyek yang akan dilayani, dan layanan apa yang harus diberikan.
- 2) Perspektif internal adalah kebijakan bagi lembaga pemerintahan yang mendorong proses inovasi daerah.
- 3) Perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya meningkatkan investasi masa yang akan datang berupa perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
- 4) Perspektif Penganggaran yaitu kebijakan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Tabel 5.1 Matrik Analisis SWOT

Internal Eksternal		KEKUATAN (<i>Strenghts</i>)	KELEMAHAN (<i>Weakness</i>)
		Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif & transparan berbasis IT	Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
		Upaya penguatan melalui Bimtek pengembangan kapasitas individu, lembaga dan sistem.	Masih perlu ditingkatkan kemampuan SDM perencana dan peneliti dalam analisa perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
		kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan dilengkapi dengan rekomendasi yang diangkat dari hasil penelitian dan pengembangan yang terfokus dan teliti serta inovatif.	Masih rendahnya Hasil penelitian dan Pengembangan serta inovasi daerah yang dihasilkan
PELUANG (<i>Opportunities</i>)	Adanya kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap perencanaan pembangunan	Meningkatkan efisiensi dan Efektifitas anggaran untuk mengoptimal program priorita	Mengoptimalkan teknologi informasi dalam memenuhi data dan informasi dasar pembangunan
	Adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan non formal lainnya		
	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meningkat	Memanfaatkan kemampuan SDM untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kapasitas aparatur perencana
	Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan		Meningkatkan penyediaan dan pemutakhiran data & informasi perencanaan pembangunan yang tepat dan akurat
ANCAMAN (<i>Threats</i>)	Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan	Memperkuat koordinasi perencanaan demi terciptanya keterpaduan antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	Mendorong peningkatan integrasi dan sikronisasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
	Sistem Informasi yang ada belum terintegrasi dengan baik	Meningkatkan pelayanan informasi perencanaan pembangunan daerah	Menjalankan proses perencanaan sesuai mekanisme peraturan

Sumber Data : Bappelitbangda, 2021

Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) perspektif di atas, dirumuskan alternatif strategi yang akan menentukan arah kebijakan, sebagai berikut :

Tabel 5.2
Matriks Rumusan Strategi

No.	PRESPEKTIF	Alternatif Strategi	STRATEGI
1	Perspektif Masyarakat	Meningkatkan pelayanan informasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat
2	Perspektif proses Internal	proses perencanaan sesuai mekanisme peraturan	Meningkatnya indeks perencanaan daerah
		Meningkatkan penyediaan data & informasi perencanaan pembangunan daerah	
		Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah	
		Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan masyarakat	Meningkatnya implementasi rencana kelitbangan daerah
		Meningkatkan pengembangan inovasi dan kreativitas daerah	
3	Perspektif Kelembagaan	Meningkatkan kapasitas aparatur perencana	Meningkatnya indeks perencanaan daerah
		Memanfaatkan kemampuan SDM untuk melakukan perencanaan yang efektif, efisien dan transparan berbasis teknologi informasi	
4	Perspektif Penganggaran	Meningkatkan efisiensi dan Efektifitas anggaran untuk mengoptimal program prioritas	

Sumber Data : Bappelitbangda, 2021

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah.

Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Keterkaitan antara Strategi, Arah kebijakan dan Program pada Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 5.3. sebagai berikut :

Tabel 5.3
Strategi, Arah Kebijakan Dan Program

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatkan Sinkronisasi Seluruh Data dan dokumen Perencanaan	Melaksanakan pendataan dan meningkatkan sistem informasi data terpadu perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Meningkatkan validitas data sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	
	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	
	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perenc. Pembangunan Daerah
Meningkatkan implementasi reward dan punishment	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur perencana	

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
terhadap hasil kinerja	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	
Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	Meningkatnya implementasi rencana kelitbangan daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Sumber Data : Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021

Tabel 5.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN MISI : Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah				
No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	1.1. Meningkatkan Sinkronisasi Seluruh Data dan dokumen Perencanaan	1.1.1. Melaksanakan pendataan dan meningkatkan sistem informasi data terpadu perencanaan pembangunan daerah
				1.1.2. Meningkatkan validitas data sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan
				1.1.3 Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan di bidang ekonomi, pemerintahan sosial budaya, dan fisik prasarana
				1.1.4. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
				1.1.5. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan
		1.2. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	1.2. Meningkatkan implementasi reward dan punishment terhadap hasil kinerja	1.2.1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan
				1.2.2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur perencana
				1.2.3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2	Meningkatkan Kinerja Penelitian dan Pengembangan Serta Inovasi Daerah	2.1. Meningkatnya implementasi rencana kelitbangan daerah	2.1. Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	2.1.1. Meningkatnya implementasi rencana kelitbangan daerah

Sumber Data : Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021

Arah kebijakan di rumuskan secara spesifik waktu pencapaian. Dengan adanya penentuan waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Tahapan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun untuk penyusunan RENSTRA. Arah kebijakan pembangunan pada Bappelitbangda Kabupaten Cirebon terangkum dalam tema/fokus pembangunan pertahun sebagaimana tabel 5.5. berikut :

Tabel 5.5
Matrik Pembangunan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
Tahun 2019-2024

No.	ARAH KEBIJAKAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Melaksanakan pendataan dan meningkatkan sistem informasi data terpadu perencanaan pembangunan daerah						
2	Meningkatkan validitas data sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan						
3	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah						
4	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan						
5	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur perencana						
6	Meningkatkan sistem koordinasi aparatur perencana pembangunan daerah						
8	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat						
9	Meningkatnya implementasi rencana kelitbangan daerah						

Sumber Data : Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2021

Gambar 5.1
Tema Pembangunan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam lampiran II. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah. Selama periode renstra Bappelitbangda tahun 2019 – 2024, dalam perjalanannya terdapat perubahan, maka dapat dilakukan dengan merevisi dan atau melengkapi dengan keterangan dan penjelasan terkait perubahan tersebut. Perubahan yang dilakukan dengan tujuan untuk pencapaian target renstra dan tujuan sasaran RPJMD terkait dengan visi misi kepala daerah. Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Periode 2019-2024 Bappelitbangda Pemerintah Kabupaten Cirebon, dapat dilihat di lampiran 2.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel 7.1 dan Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Satuan	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Akhir periode RPJMD
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rata-rata Persentase ketercapaian Indikator sasaran daerah	%	46,21	60	60	60	60	60	60
2	Rata-rata Persentase ketercapaian Indikator sasaran skpd	%	61,65	60	65	70	75	80	80
3	Rata-rata Persentase ketercapaian Kinerja program	%	55,66	70	75	80	85	90	90
Indeks Perencanaan Daerah		%	52,73	62	60	80	82	85	85

Sumber Data : Bappelitbangda, 2021

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RENSTRA

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja 2020	Target Capaian Setiap Tahun (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	-	-	73	75	80	85	85
2	Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang perekonomian dan SDA	%	-	-	75	80	85	90	90
3	Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	-	-	80	95	96	97	97
4	Prosentase peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah	%	-	-	80	80	82	85	85
5	Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	-	-	10	10	10	10	10
6	prosentase jumlah pelayanan yang dilaksanakan sesuai SOP	%	-	-	-	100	100	100	100

Sumber Data : Bappelitbangda, 2021

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon. Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Cirebon Tahun 2019 - 2024 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dan menjadi pedoman bagi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2019-2024.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, maka Bappelitbangda Kabupaten Cirebon berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Rencana Strategis Tahun 2019-2024 ke dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Rencana Strategis periode Tahun 2019-2024.

Demikian, semoga perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan dan perkembangan situasi yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

Demikian, semoga perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan dan perkembangan situasi yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN:

1. MATRIK SINKRONISASI ALUR SASARAN RENSTRA BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 – 2024
2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024 BAPPELITBANGDA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

LAMPIRAN I. : MATRIK SINKRONISASI ALUR SASARAN RENSTRA BAPPELITBANGDA

RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 - 2024								RENSTRA BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON											
VISI KAB. CIREBON	MISI KABUPATEN CIREBON	ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULA SI/ PENJELASAN	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	OUTPUT/ KELUARAN	SUB KEGIATAN	SUB OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN	MISI 4 : Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai SAKIP	Peningkatan Akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara profesional dan inovatif	meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah	(jumlah program pada RKPD yang konsisten dengan program pada RPJMD dibagi jumlah program pada RKPD X 100%) + (Jumlah program pada Rencana Kerja Perangkat Daerah yang konsisten dengan program pada RKPD dibagi jumlah program pada RRNJA X 100%) + (Jumlah program pada APBD yang konsisten dengan jumlah program pada Rencana Kerja dibagi jumlah program pada APBD X 100%) dibagi 3	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	indeks perencanaan daerah	(% ketercapaian indikator sasaran daerah x 20%) + (% ketercapaian indikator sasaran SKPD x 30%) + (% ketercapaian indikator kinerja program x 50%)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen daftar inventarisasi masalah pembangunan
																		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan secara terpadu
																		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dokumen Hasil Konsultasi Publik
																		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
																		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Musrenbang RKPD
																		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen Skala Prioritas Kecamatan

																		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RPJPD Periode 2025-2045, Dokumen Musrenbang RPJPD Periode 2025-2045, Dokumen RPJMD Periode 2024-2029, Dokumen Musrenbang RPJPD Periode 2025-2045, Dokumen RPJMD Periode 2024-202, Perubahan RKPD, RPJMD Perubahan 2019-2024		
																		Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dianalisis	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah
																					Jumlah dokumen Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah
																		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan tingkat SKPD		

																		Penyusunan Profil Pembanguna n Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah		
																		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendali an, Evaluasi dan Pelaksanaan Pembanguna n Daerah di Kabupaten/Ko ta	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembanguna n Daerah di Kabupaten/Ko ta	Dokumen Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
																				Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	dokumen pengendalian kerjasama pembangunan daerah
																				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembanguna n Daerah	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulanan
														Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang Pemerintah an dan Pembangun an Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen hasil perencanaaa n, kajian, koordinasi dan monev pembangun an pemerintah an dan pembangun an manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen hasil koordinasi/rak or perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang dilaksanakan; Jumlah Dokumen laporan hasil sosialisasi/sem inar pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		

																		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen laporan hasil fasilitasi, Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja murni, Renja perubahan, Perkin IKU) Bidang Pemerintahan
																		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil monitoring, analisis dan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan terutama terkait evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren kabupaten dan Kegiatan PD
																		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pembanguna n Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan induk pembangunan manusia (bidang pendidikan, kesehatan, kesra/sosial yang disesuaikan SPM dan dinamika peraturan perundang- undangan yang baru) yang dihasilkan
																			Jum dok. Lap. hasil koord. dan monitoring Evaluasi kinerja bidang pendidikan dan kesehatan

																		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Pembanguna n Manusia	Jumlah Dokumen laporan hasil fasilitasi, asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja, Renja perubahan, IKU Perkin) SKPD bidang Pembangunan manusia
																		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Pembanguna n Manusia	Dokumen penanggulang an kemiskinan daerah
																			Dokumen hasil koordinasi/rak or monitoring dan evaluasi pronangkis
																			Aplikasi Pronangkis (Simiskinrangg a) untuk pengembanga n
															Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang perekonomi an dan SDA	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah dokumen perencanaa n Bidang Perekonomi an dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Perekonomia n (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian
																		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	jum dokumen laporan hasil asistensi penydokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup bidang perekonomian

																	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup bidang perekonomian
																	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
																	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup bidang SDA (Sumber Daya Alam) RPJPD,RPJMD,dan RKPD
																	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup bidang SDA (Sumber Daya Alam)
														Prosentase pencapaian kinerja perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

																dan kewilayahan		Kewilayahan	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Infrastruktur
																			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur
																			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur
																			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
																			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
																			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Lingkup bidang Kewilayahan
																			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

																		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Lingkup Bidang Kewilayahan
																		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Kewilayahan
					Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat				Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	indeks kepuasan masyarakat	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang diisi dikali nilai penimbang	Program Penunjang Urrusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	prosentase jumlah pelayanan yang dilaksanakan sesuai SOP	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja yang dihasilkan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan
																		Koordinasi dan Peny. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan
																		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jml dok evaluasi dan pelaporan yang dihasilkan
																Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengadministrasian keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan.
																		Koordinasi dan Peny. Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan
																		Koordinasi dan Peny. Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan
																		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan akhir tahun

																Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadmini- strasian barang milik daerah	Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Pajak Kendaraan Bermotor
																		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan
																Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
																Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
																		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibelanjakan
																		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jml peralatan rumah tangga yang disediakan
																		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan
																		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
																		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU	Jumlah bahan bacaan yang disediakan
																		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/ Material yang disediakan
																		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan tamu yang difasilitasi
																		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jml laporan rapat koord. dan konsultasi ke luar daerahJumlah laporan hasil

																				Perjalanan dinas (dalam daerah dan luar daerah)
																	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pelayanan yang di SOP kan		
															Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan		
																	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasioanal atau Lapangan yang diadakan		
																	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan		
															Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/ dilaksanakana n	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayarkan		
																	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen jasa pelayanan umum yang diterbitkan		
																				Jml kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharaannya

																		Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara
																		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara
																		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara
																		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara
								meningkatkan kinerja Penelitian dan Pengembangan serta inovasi daerah	hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	jumlah hasil penelitian dan pengembangan atau inovasi yang diimplementasikan dibagi hasil penelitian dan pengembangan atau inovasi yang terinventarisir dikali 100%	meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah	prosentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti SKPD	Jumlah kelitbangan dalam RKPD dibagi jumlah kelitbangan dalam RIK dikali 100%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan	Jumlah penelitian bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.
																		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang keuangan, aset daerah dan reformasi birokrasi (pajak daerah, barang milik daerah dan reformasi birokrasi).
																		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen pengelolaan data kelitbangan dan peraturan
																Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian	Penelitian dan Pengembangan Bidang	Jumlah penelitian dan pengembangan

																dan Kependudukan	dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Aspek- Aspek Sosial	n bidang sosial (Kemiskinan, Penyakit Masyarakat, Penyakit tidak menular, jaminan kesehatan daerah).
																		Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penelitian dan karya tulis tingkat remaja yang dihasilkan dan memenuhi kriteria pemenang
																		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang pariwisata (destinasi wisata, wisata budaya, master plan, road map pariwisata, urban tourism)
																Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang ekonomi (industri, sektor informal, pasar digital, branding daerah).
																		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi pertanian.
																		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang lingkungan hidup (konservasi lingkungan, bencana alam dan ruang terbuka hijau).

																	Penelitian dan Pengembangan Umum	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum (infrastruktur jalan, jembatan dan pengelolaan sumber daya air).
																	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum (infrastruktur jalan, jembatan dan pengelolaan sumber daya air).
																	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum (infrastruktur jalan, jembatan dan pengelolaan sumber daya air)
															Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen riset/pengembangan inovasi dan teknologi
																	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Dokumen hasil diseminasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif
																	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dok sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan daerah

														Program Penelitian dan Pengemb., sosek dan Kewilayahan	Prosentase hasil Litbang .Sosial,ekono mi dan kewil. yang di manfaatkan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial penelitian Remaja Bidang Sosek dan Kewilayahan			Jml penelitian dan pengemb bid social
																			Jumlah penelitian dan karya tulis tingkat remaja yang dihasilkan dan memenuhi kriteria pemenang
																Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi			jumlah penelitian dan pengembanga n bidang ekonomi
																Penelitian dan Pengembangan Bidang kewilayahan			Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kewilayahan
											meningkatnya Inovasi daerah	prosentase hasil inovasi yang ditindaklanjuti SKPD	Jml inovasi dan kreativitas daerah yang diimplementasikan dibagi dengan jml inovasi dan kreativitas daerah yang dihasilkan dikali 100%	Program Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Daerah	Prosentase Inovasi dan kreativitas daerah yang dikembangkan	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Manajemen Banjir			Jumlah Dokumen Pengembangan n Teknologi manajemen daerah rawan banjir
																Fasilitasi Riset Daerah			Jml Riset Daerah yang di fasilitasi
																Riset Mandiri Kelitbangan			jumlah riset dalam kebijakan setiap tahun
																Sinergitas Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan			jumlah laporan sinergitas yang dilakukan penelitian dan pengembangan

Sumber Data : Bappelitbangda, 2021



LAMPIRAN II : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERIODE 2019-2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah				Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah	0 prosentase	62	15.394.856.000	80	31.700.547.800	85	27.022.555.000	90	36.970.690.000	95	38.495.590.000	95	149.584.238.800	
	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah			indeks perencanaan daerah	0 prosen	62	3.582.637.000	60	18.080.000.000	80	11.270.000.000	82	16.875.000.000	85	17.760.000.000	85	67.567.637.000	
		02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	0 Prosen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
				ketersediaan data perencanaan pembangunan	0 Dokumen	0	0	3	560.000.000	0	0	0	0	0	0	3	560.000.000	
				Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 Prosen	100	5.000.000	100	2.245.000.000	0	0	0	0	0	0	100	2.250.000.000	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	0 Prosen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				prosentase jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan Kabupaten Cirebon	100 Prosen	100	67.128.000	100	300.000.000	0	0	0	0	0	0	100	367.128.000	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	100 Prosen	100	15.000.000	100	1.535.000.000	0	0	0	0	0	0	100	1.550.000.000	
				Meningkatnya SKPD dalam menetapkan IKU dan Perkin	100 Prosen	100	145.711.000	100	200.000.000	0	0	0	0	0	0	100	345.711.000	

				Prosentase peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah	0 Prosen	0	0	80	7.055.000.000	80	7.450.000.000	82	12.670.000.000	85	13.495.000.000	85	40.670.000.000	
		02.2.0 1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan	0 Dok	4	20.000.000	13	9.480.000.000	12	5.800.000.000	16	10.720.000.000	16	11.245.000.000	16	37.265.000.000	
		02.2.0 1.01.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen daftar inventarisasi masalah pembangunan	0 Dok	0	0	1	100.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000	4	925.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah dokumen daftar inventarisasi masalah pembangunan	0 Dok	0	0	1	95.000.000	0	0	0	0	0	0	1	95.000.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
		02.2.0 1.02.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan secara terpadu	0 Dok	0	0	1	600.000.000	1	600.000.000	1	700.000.000	1	850.000.000	4	2.750.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah dokumen hasil integrasi perencanaan secara terpadu	0 Dok	0	0	1	485.000.000	0	0	0	0	0	0	1	485.000.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
		02.2.0 1.03.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dokumen Hasil Konsultasi Publik	0 Dok	0	0	1	550.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	700.000.000	4	2.400.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Dokumen Hasil Konsultasi Publik	0 Dok	1	5.000.000	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	2	505.000.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
		02.2.0 1.04.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi/validasi pada setiap bidang urusan	0 Dok	0	0	4	700.000.000	4	700.000.000	4	750.000.000	4	800.000.000	16	2.950.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah dokumen hasil koordinasi/validasi pada setiap bidang urusan	0 Dok	0	0	4	550.000.000	0	0	0	0	0	0	4	550.000.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

		02.2.0 1.05.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Musrenbang RKPd	0 Dok	0	0	1	800.000.000	1	800.000.000	1	850.000.000	1	900.000.000	4	3.350.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Dokumen Hasil Musrenbang RKPd	0 Dok	0	0	1	710.000.000	0	0	0	0	0	0	1	710.000.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
		02.2.0 1.06.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen Skala Prioritas Kecamatan	0 Dok	0	0	2	200.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	8	950.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Dokumen Skala Prioritas Kecamatan	0 Dok	1	5.000.000	2	130.000.000	0	0	0	0	0	0	3	135.000.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
		02.2.0 1.07.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RPJPD Periode 2025-2045	0 Dok	0	0	0	0	0	0	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000	2	2.900.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Dokumen Musrenbang RPJPD Periode 2025- 2045	0 Dok	0	0	0	0	0	0	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000	2	2.900.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Dokumen RPJMD Periode 2024-2029	0 Dok	0	0	0	0	0	0	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000	2	2.900.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				dokumen Musrenbang RPJMD Periode 2024- 2029	0 Dok	0	0	0	0	0	0	1	145.000.000	1	145.000.000	2	290.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Dokumen RKPd	0 Dok	0	0	1	1.350.000.000	1	1.350.000.000	1	1.400.000.000	1	1.450.000.000	4	5.550.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

				Dokumen Perubahan RKPd	0 Dok	0	0	1	1.350.000.000	1	1.350.000.000	1	1.400.000.000	1	1.450.000.000	4	5.550.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Dokumen RPJMD Perubahan 2019-2024	0 Dok	0	0	1	55.000.000	0	0	0	0	0	0	1	55.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Dokumen RPJPD Periode 2025-2045	0 Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
				Dokumen Musrenbang RPJPD Periode 2025-2045	0 Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
				Dokumen RPJMD Periode 2024-2029	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
				dokumen Musrenbang RPJMD Periode 2024-2029	0 Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
				Dokumen RKPd	0 Dok	1	5.000.000	1	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	2	1.305.000.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
				Dokumen Perubahan RKPd	0 Dok	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	10.000.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
		02.2.0 2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalaian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dianalisis	0 Dok	0	0	2	865.000.000	3	800.000.000	3	950.000.000	3	1.100.000.000	3	3.715.000.000	
		02.2.0 2.01.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	0 Dok	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	4	1.350.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah dokumen Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	0 Dok	0	0	1	265.000.000	0	0	0	0	0	0	1	265.000.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

		02.2.0 2.02.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan tingkat SKPD	0 Dok	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	4	950.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan tingkat SKPD	0 Dokumen	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
		02.2.0 2.03.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	0 Dok	0	0	0	0	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	3	1.050.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	0 Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
		02.2.0 3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan	0 Dok	8	212.839.000	10	1.550.000.000	6	850.000.000	6	1.000.000.000	6	1.150.000.000	6	4.762.839.000	
		02.2.0 3.01.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Dokumen Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	0 Dok	0	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	4	1.150.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) PEMDA dan Indikator Kinerja Utama (IKU) PEMDA Murni dan Perubahan	0 Dok	4	145.711.000	4	200.000.000	0	0	0	0	0	0	8	345.711.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
		02.2.0 3.02.	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	dokumen pengendalian kerjasama pembangunan daerah	0 Dok	0	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	4	1.150.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				dokumen data kerjasama daerah	0 Dok	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

		02.2.0 3.03.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulanan	0 Dok	0	0	4	350.000.000	4	350.000.000	4	400.000.000	4	450.000.000	16	1.550.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulanan	0 Dok	4	67.128.000	4	300.000.000	0	0	0	0	0	0	8	367.128.000	BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
		03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase pencapaian kinerja perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	0 Prosen	100	800.000.000	100	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	100	1.800.000.000	
				Jumlah rekomendasi kebijakan, hasil kajian dari hasil perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang harus dilaksanakan oleh SKPD terkait	0 Buah	10	935.000.000	15	1.525.000.000	0	0	0	0	0	0	25	2.460.000.000	
				Ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup koordinasi bidang ekonomi yang memenuhi target	0 Prosen	100	1.614.798.000	100	1.075.000.000	0	0	0	0	0	0	100	2.689.798.000	
				Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0 Prosen	0	0	80	1.000.000.000	95	1.510.000.000	96	1.570.000.000	97	1.630.000.000	97	5.710.000.000	
				Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0 Prosen	0	0	73	815.000.000	75	1.540.000.000	80	1.865.000.000	85	1.865.000.000	85	6.085.000.000	
				Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang perekonomian dan SDA	0 Prosen	0	0	75	770.000.000	80	770.000.000	85	770.000.000	90	770.000.000	90	3.080.000.000	

		03.2.0 1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen hasil perencanaan, kajian, koordinasi dan monev pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia	0 dokumen	0	935.000.000	8	2.340.000.000	12	1.540.000.000	23	1.865.000.000	23	1.865.000.000	66	8.545.000.000	
		03.2.0 1.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Sosialisasi/seminar pembangunan mengenai bidang pemerintahan sosial budaya	4 kali	4	300.000.000	3	70.000.000	0	0	0	0	0	0	7	370.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
				Jumlah Dokumen hasil koordinasi/rakor perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang dilaksanakan	0 Dok	0	0	3	120.000.000	3	275.000.000	3	280.000.000	3	280.000.000	12	955.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
				jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemsosbud yang dilaksanakan	60 kali	60	250.000.000	40	250.000.000	0	0	0	0	0	0	100	500.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
				Jumlah Dokumen laporan hasil sosialisasi/seminar pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	0 Dok	0	0	2	35.000.000	2	65.000.000	3	65.000.000	3	70.000.000	10	235.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
		03.2.0 1.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen laporan hasil fasilitasi, Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja murni, Renja perubahan, Perkin IKU) Bidang Pemerintahan	0 Dok	0	0	0	0	0	0	7	200.000.000	7	200.000.000	14	400.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
		03.2.0 1.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	dokumen Kajian Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kabupaten dan Program Perangkat Daerah	0 dokumen	1	375.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	375.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

				Jumlah Dokumen hasil monitoring, analisis dan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan terutama terkait evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren kabupaten dan Kegiatan PD	0 Dok	0	0	0	0	0	0	1	250.000.000	1	250.000.000	2	500.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
				jumlah database perencanaan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	0 database	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
		03.2.0 1.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rencana induk pembangunan dan pengembangan sektor pendidikan yang disesuaikan SPM dan dinamika dan peraturan perundang-undangan yg baru	0 dokumen	0	0	1	750.000.000	0	0	0	0	0	0	1	750.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
				Jumlah Dokumen Perencanaan induk pembangunan manusia (bidang pendidikan, kesehatan, kesra/sosial yang disesuaikan SPM dan dinamika peraturan perundang-undangan yang baru) yang dihasilkan	0 Dok	0	0	1	500.000.000	1	600.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	4	1.900.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
				Dokumen Rencana induk pembangunan dan pengembangan sektor kesehatan yang disesuaikan SPM dan dinamika dan peraturan perundang-undangan yg baru	0 Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
				Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan monitoring Evaluasi kinerja bidang pendidikan dan kesehatan	0 Dok	0	0	0	0	2	40.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000	6	145.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

		03.2.0 1.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen laporan hasil fasilitasi, asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja, Renja perubahan, IKU Perkin) SKPD bidang Pembangunan manusia	0 Dok	0	0	0	0	0	0	7	200.000.000	7	200.000.000	14	400.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
		03.2.0 1.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen penanggulangan kemiskinan daerah	0 Dok	0	0	1	5.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	4	230.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
				Dokumen hasil koordinasi/rakor monitoring dan evaluasi pronangkis	0 Dok	0	0	2	150.000.000	3	400.000.000	3	260.000.000	3	250.000.000	11	1.060.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
				Aplikasi Pronangkis (Simiskinranga) untuk pengembangan	0 Aplikasi	0	0	1	5.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	4	260.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
				Tersusunnya dokumen penanggulangan kemiskinan daerah	0 Dok	0	0	1	450.000.000	0	0	0	0	0	0	1	450.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
				Dokumen hasil monev ke sekolah untuk bahan evaluasi sarpras, permasalahan dan capaian kinerja pendidikan	0 Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
		03.2.0 1.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	dokumen Laporan kegiatan	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
				dokumen Laporan kegiatan pronangkis awards	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
				Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1 dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	2	10.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

		03.2.0 2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	0 Dok	0	1.614.798.000	1	1.845.000.000	1	770.000.000	1	770.000.000	1	770.000.000	4	5.769.798.000	
		03.2.0 2.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 Dok	3	644.915.000	3	503.000.000	0	0	0	0	0	0	6	1.147.915.000	BIDANG EKONOMI
				Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian	0 Dok	0	0	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	1	300.000.000	7	1.200.000.000	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		03.2.0 2.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	dokumen laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan SKPD lingkup bidang perekonomian dan SDA	1 dokumen	1	129.723.000	1	19.000.000	0	0	0	0	0	0	2	148.723.000	BIDANG EKONOMI
				jumlah dokumen laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup bidang perekonomian	0 Dok	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		03.2.0 2.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	1 Dok	1	240.000.000	1	102.000.000	0	0	0	0	0	0	2	342.000.000	BIDANG EKONOMI
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup bidang perekonomian	0 Dok	0	0	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	4	500.000.000	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		03.2.0 2.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang perekonomian	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG EKONOMI

		03.2.0 2.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam	3 Dokumen	3	360.160.000	3	386.000.000	0	0	0	0	0	0	6	746.160.000	BIDANG EKONOMI
				Jumlah Dokumen laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dok	0	0	2	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	800.000.000	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		03.2.0 2.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup bidang SDA (Sumber Daya Alam) RPJPD,RPJMD,dan RKPD	0 Dok	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4	80.000.000	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		03.2.0 2.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam	1 Dokumen	1	240.000.000	1	65.000.000	0	0	0	0	0	0	2	305.000.000	BIDANG EKONOMI
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup bidang SDA (Sumber Daya Alam)	0 Dok	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		03.2.0 3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0 Dok.	0	800.000.000	7	2.000.000.000	9	1.510.000.000	11	1.570.000.000	11	1.630.000.000	38	7.510.000.000	
		03.2.0 3.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Data perencanaan dan evaluasi pembangunan Bidang kebinamargaan dan perhubungan	3 Dok	2	200.000.000	2	200.000.000	0	0	0	0	0	0	4	400.000.000	BIDANG FISIK PRASARANA
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3 Dok	0	0	2	200.000.000	1	400.000.000	2	450.000.000	2	500.000.000	7	1.550.000.000	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

		03.2.0 3.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen hasil assistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	0 Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG FISIK PRASARANA
				Dokumen Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur	0 Dok	0	0	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	225.000.000	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	
		03.2.0 3.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	0 Dok	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	1	200.000.000	BIDANG FISIK PRASARANA	
				Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur	0 Dok	0	0	1	200.000.000	1	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	6	1.100.000.000	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
		03.2.0 3.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	0 Dok	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	
		03.2.0 3.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen perencanaan infrastruktur wilayah perbatasan	1 dok	1	150.000.000	1	150.000.000	0	0	0	0	0	2	300.000.000	BIDANG FISIK PRASARANA	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	0 Dok	0	0	1	150.000.000	2	265.000.000	2	275.000.000	2	285.000.000	7	975.000.000	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

		03.2.0 3.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Lingkup bidang Kewilayahan	0 Dok	0	0	0	0	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	3	210.000.000	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
		03.2.0 3.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	data perencanaan dan evaluasi pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 Dok	1	200.000.000	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	2	400.000.000	BIDANG FISIK PRASARANA
				Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Lingkup Bidang Kewilayahan	0 Dok	0	0	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	500.000.000	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
		03.2.0 3.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Data Perencanaan dan evaluasi sektor air minum, drainase dan sanitasi	2 Dok	2	250.000.000	2	250.000.000	0	0	0	0	0	0	4	500.000.000	BIDANG FISIK PRASARANA
				Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Kewilayahan	0 Dok	0	0	2	250.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	850.000.000	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan			Indeks Kepuasan Masyarakat	78,05 Nilai	82	11.812.219.000	83	13.620.547.800	84,5	15.752.555.000	85	20.095.690.000	87	20.735.590.000	87	82.016.601.800	
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja	100 Prosen	100	465.000.000	100	1.020.000.000	0	0	0	0	0	0	100	1.485.000.000	
				prosentase meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	0 Prosen	100	1.466.440.000	100	1.751.419.000	0	0	0	0	0	0	100	3.217.859.000	
				Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	0 Prosen	100	9.875.779.000	100	10.664.128.800	0	0	0	0	0	0	100	20.539.907.800	
				Prosentase Pegawai yang Disiplin	0 Prosen	100	5.000.000	100	135.000.000	0	0	0	0	0	0	100	140.000.000	

				prosentase jumlah pelayanan yang dilaksanakan sesuai SOP	0 Prosen	0	0	0	50.000.000	100	15.752.555.000	100	20.095.690.000	100	20.735.590.000	100	56.633.835.000	
		01.2.0 1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja subkegiatan pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 BA	0	465.000.000	1	1.020.000.000	0	775.000.000	0	855.000.000	0	860.000.000	1	3.975.000.000	
				Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja yang dihasilkan	0 dokumen	0	465.000.000	0	1.020.000.000	20	775.000.000	20	855.000.000	20	860.000.000	20	3.975.000.000	
		01.2.0 1.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12	175.000.000	12	300.000.000	0	0	0	0	0	0	24	475.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
				jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	0 dokumen	0	0	0	0	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	30	1.050.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 1.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	0 Dok	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 1.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2	140.000.000	2	170.000.000	0	0	0	0	0	0	4	310.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
				dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	0 dokumen	0	0	0	0	2	175.000.000	2	205.000.000	2	210.000.000	6	590.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 1.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang dihasilkan	6 Dokumen	6	150.000.000	7	250.000.000	0	0	0	0	0	0	13	400.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
				jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang dihasilkan	0 dokumen	0	0	0	0	8	250.000.000	8	300.000.000	8	300.000.000	24	850.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 BA	0	8.299.600.000	0	8.641.100.000	0	9.214.790.000	0	10.258.190.000	0	11.300.590.000	0	47.714.270.000	
				Jumlah laporan pengadministrasian keuangan	0 Dok	0	8.299.600.000	1	8.641.100.000	3	9.214.790.000	3	10.258.190.000	3	11.300.590.000	3	47.714.270.000	

		01.2.0 2.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	0 Pegawai	43	8.133.157.000	43	8.458.000.000	0	0	0	0	0	43	16.591.157.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan.	0 Pegawai	0	0	0	0	52	9.109.790.000	57	10.140.190.000	62	11.170.590.000	62	30.420.570.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		01.2.0 2.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	0 dok	1	77.174.000	1	85.000.000	0	0	0	0	0	2	162.174.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	
				dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan	0 Dok	0	0	0	0	1	85.000.000	1	93.000.000	1	100.000.000	3	278.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 2.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	1 dokumen	1	12.095.000	1	13.100.000	0	0	0	0	0	2	25.195.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	
				Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	0 Dok	0	0	0	0	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	6	75.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 2.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 Dok	1	77.174.000	1	85.000.000	0	0	0	0	0	2	162.174.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	
		01.2.0 3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0 BA	0	700.000.000	0	715.000.000	0	900.000.000	0	950.000.000	0	950.000.000	0	4.215.000.000	
				Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah	0 Dok	0	700.000.000	1	715.000.000	1	900.000.000	1	950.000.000	1	950.000.000	1	4.215.000.000	
		01.2.0 3.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pajak Kendaraan Bermotor	27 unit	0	0	27	15.000.000	0	0	0	0	0	27	15.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	
		01.2.0 3.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Operasional dan perlengkapan kantor	0 jenis belanja	6	700.000.000	9	700.000.000	0	0	0	0	0	9	1.400.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	
				jumlah barang miilik daerah yang dimanfaatkan	0 jenis	0	0	0	0	6	900.000.000	6	950.000.000	6	950.000.000	6	2.800.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA

		01.2.0 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 BA	0	5.000.000	1	135.000.000	0	135.000.000	0	135.000.000	0	135.000.000	1	545.000.000	
				Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik	0 Orang	0	5.000.000	0	135.000.000	70	135.000.000	70	135.000.000	70	135.000.000	70	545.000.000	
		01.2.0 5.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	0 stel	1	5.000.000	83	135.000.000	0	0	0	0	0	0	83	140.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
				Jumlah pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	0 jenis	0	0	0	0	6	135.000.000	6	135.000.000	6	135.000.000	6	405.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 BA	0	1.356.179.000	1	1.733.028.800	0	2.110.000.000	0	2.232.500.000	0	2.345.000.000	1	9.776.707.800	
				Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan	0 Jenis	0	1.356.179.000	0	1.733.028.800	7	2.110.000.000	7	2.232.500.000	7	2.345.000.000	7	9.776.707.800	
		01.2.0 6.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	0 jenis	24	15.000.000	14	17.000.000	0	0	0	0	0	0	14	32.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
				jumlah komponen instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	0 jenis	0	0	0	0	14	20.000.000	14	25.000.000	14	30.000.000	14	75.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 6.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	13 jenis	13	928.208.000	13	1.021.028.800	0	0	0	0	0	0	26	1.949.236.800	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
				jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibelanjakan	0 jenis	0	0	0	0	10	1.200.000.000	10	1.200.000.000	10	1.200.000.000	10	3.600.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 6.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan rumah tangga	0 set	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	1	15.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
				jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	0 jenis	0	0	0	0	20	100.000.000	20	125.000.000	20	150.000.000	20	375.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 6.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	0 jenis	0	0	0	0	50	100.000.000	50	125.000.000	50	150.000.000	50	375.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA

		01.2.0 6.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 macam	10	30.000.000	10	30.000.000	0	0	0	0	0	10	60.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	
				Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	0 macam	0	0	0	0	11	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	150.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 6.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran lokal dan regional	4 jenis	4	44.898.000	4	47.000.000	0	0	0	0	0	4	91.898.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	
				Jumlah bahan bacaan yang disediakan	0 Jenis	0	0	0	0	2	60.000.000	4	62.500.000	4	65.000.000	4	187.500.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 6.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang dipergunakan	90 Jenis	90	79.993.000	95	88.000.000	0	0	0	0	0	95	167.993.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	
				Jumlah Bahan/ Material yang disediakan	0 jenis	0	0	0	0	15	25.000.000	15	30.000.000	15	35.000.000	15	90.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 6.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan	2 jumlah jenis jamuan	2	60.280.000	2	65.000.000	0	0	0	0	0	2	125.280.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	
				Jumlah jamuan tamu yang difasilitasi	0 Jamuan	0	0	0	0	120	55.000.000	120	60.000.000	120	65.000.000	120	180.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 6.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan dinas luar daerah	415 laporan	415	197.800.000	425	200.000.000	0	0	0	0	0	840	397.800.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	
				Jumlah laporan hasil Perjalanan dinas (dalam daerah dan luar daerah)	0 Kali	0	0	0	0	75	300.000.000	75	330.000.000	75	350.000.000	75	980.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 6.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah aspek yang di SOP kan	0 Dok	0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	0	1	250.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	
				Jumlah pelayanan yang di SOP kan	0 dok	0	0	0	0	1	200.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	1	675.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 BA	0	98.200.000	1	246.250.000	0	160.000.000	0	1.975.000.000	0	1.575.000.000	1	4.054.450.000	
				Jumlah barang milik daerah yang diadakan	0 Jenis	0	98.200.000	0	246.250.000	2	160.000.000	2	1.975.000.000	2	1.575.000.000	2	4.054.450.000	

		01.2.0 7.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	0 Unit	0	0	1	50.000.000	1	30.000.000	3	900.000.000	2	500.000.000	7	1.480.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 7.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasioanal	26 unit	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
				Jumlah Kendaraan Dinas operasioanal atau Lapangan yang diadakan	0 unit	0	0	0	0	0	0	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	2.000.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 7.05.	Pengadaan Mebel	jumlah mebeuler yang disediakan	3 jenis	3	98.200.000	4	146.250.000	0	0	0	0	0	0	7	244.450.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
				Jumlah mebel yang diadakan	0 Jenis	0	0	0	0	5	130.000.000	6	75.000.000	7	75.000.000	7	280.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pelayanan umum yang dilaksanakan	0 jenis	0	200.000.000	0	250.000.000	0	900.000.000	0	775.000.000	0	800.000.000	0	2.925.000.000	
				Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/ dilaksanakan	0 Jenis	0	200.000.000	0	250.000.000	2	900.000.000	2	775.000.000	2	800.000.000	2	2.925.000.000	
		01.2.0 8.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis Rekening	3 jenis rekening	3	200.000.000	3	250.000.000	0	0	0	0	0	0	3	450.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
				jumlah rekening yang dibayarkan	0 rekening	0	0	0	0	3	400.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	900.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 8.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	0 Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
				Jumlah dokumen jasa pelayanan umum yang diterbitkan	0 Dok	0	0	0	0	3	500.000.000	3	525.000.000	3	550.000.000	9	1.575.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 BA	0	688.240.000	1	880.169.000	0	1.557.765.000	0	2.915.000.000	0	2.770.000.000	1	8.811.174.000	
				Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	0 Jenis	0	688.240.000	0	880.169.000	4	1.557.765.000	4	2.915.000.000	4	2.770.000.000	4	8.811.174.000	
		01.2.0 9.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	0 Unit	0	0	0	0	20	350.000.000	23	375.000.000	25	400.000.000	25	1.125.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA

		01.2.0 9.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK Kendaraan bermotor roda dua yang terbayarkan	18 unit	18	15.000.000	19	20.000.000	0	0	0	0	0	0	19	35.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
				Jumlah STNK Kendaraan bermotor roda empat yang terbayarkan	8 unit	8	5.000.000	8	5.000.000	0	0	0	0	0	0	8	10.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
				Jumlah STNK Kendaraan dinas dan operasional roda dua dan roda 4 yang terbayarkan	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
				Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharaannya	0 Unit	0	0	0	0	3	182.765.000	3	185.000.000	3	185.000.000	3	552.765.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 9.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	4 jenis	4	18.240.000	4	20.000.000	0	0	0	0	0	0	4	38.240.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
				jumlah mebel yang dipelihara	0 Jenis	0	0	0	0	9	25.000.000	9	30.000.000	9	35.000.000	9	90.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 9.09.	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diperlihara	7 macam	7	350.000.000	7	350.000.000	0	0	0	0	0	0	7	700.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
				Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0 Bagian	0	0	0	0	5	400.000.000	10	425.000.000	11	450.000.000	11	1.275.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 9.10.	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	6 jenis	6	30.000.000	9	115.169.000	0	0	0	0	0	0	15	145.169.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	0 Unit	0	0	0	0	5	300.000.000	5	900.000.000	5	900.000.000	5	2.100.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
		01.2.0 9.11.	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diperlihara	100 Unit	100	270.000.000	1	370.000.000	0	0	0	0	0	0	1	640.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	0 Jenis	0	0	0	0	5	300.000.000	9	1.000.000.000	11	800.000.000	11	2.100.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA

Meningkatkan Kinerja Penelitian dan Pengembangan Serta Inovasi Daerah				Hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	0 Prosen	10	1.317.647.000	10	3.243.500.000	10	4.600.000.000	10	4.250.000.000	10	4.850.000.000	10	18.261.147.000	
	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah			Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti SKPD	0 Prosen	10	655.000.000	10	2.088.500.000	0	0	0	0	0	0	10	2.743.500.000	
		02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase hasil penelitian pemerintahan, sosial, ekonomi dan pembangunan yang diimplementasikan	0 prosen	10	655.000.000	10	2.083.500.000	0	0	0	0	0	0	10	2.738.500.000	
				Persentase pemanfaatan hasil LITBANG tentang SDM dan IPTEK	0 prosen	10	0	10	5.000.000	0	0	0	0	0	0	10	5.000.000	
		02.2.0 1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	0 Dok	0	0	0	518.500.000	1	0	1	0	1	0	3	518.500.000	
		02.2.0 1.03.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah penelitian bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	0 Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		02.2.0 1.05.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang keuangan, aset daerah dan reformasi birokrasi (pajak daerah, barang milik daerah dan reformasi birokrasi)	0 Dok	0	0	1	518.500.000	0	0	0	0	0	0	1	518.500.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		02.2.0 2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0 Dok	0	250.000.000	1	200.000.000	1	0	1	0	1	0	4	450.000.000	
		02.2.0 2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang sosial (Kemiskinan, Penyakit Masyarakat, Penyakit tidak menular, jaminan kesehatan daerah)	0 dokumen	1	250.000.000	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	2	450.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		02.2.0 3.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0 Dok	0	405.000.000	0	1.365.000.000	1	0	1	0	1	0	3	1.770.000.000	

		02.2.0 3.02.	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang ekonomi (industri, sektor informal, pasar digital, branding daerah)	0 Dok	1	5.000.000	1	200.000.000	0	0	0	0	0	2	205.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		02.2.0 3.04.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi pertanian	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		02.2.0 3.07.	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang lingkungan hidup (konservasi lingkungan, bencana alam dan ruang terbuka hijau)	0 Dok	1	400.000.000	2	450.000.000	0	0	0	0	0	3	850.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		02.2.0 3.09.	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan tata ruang (infrastruktur jalan, jembatan dan penataan ruang daerah)	0 Dok	0	0	1	715.000.000	0	0	0	0	0	1	715.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		02.2.0 3.10.	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang perhubungan (transportasi, moda transportasi massal)	0 Dok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		02.2.0 4.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	0 Dok	0	0	1	5.000.000	1	0	1	0	1	4	5.000.000	
		02.2.0 4.01.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen hasil koordinasi yang dilaksanakan	0 Dokumen	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	1	5.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Meningkatnya Inovasi daerah			Prosentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti SKPD	0 Prosen	10	662.647.000	10	1.155.000.000	0	0	0	0	0	10	1.817.647.000	
		02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase inovasi dan kreativitas daerah yang diaplikasikan (diterapkan)	0 prosen	10	662.647.000	10	1.155.000.000	0	0	0	0	0	10	1.817.647.000	
		02.2.0 4.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	0 Dok	0	662.647.000	1	1.155.000.000	1	0	1	0	1	4	1.817.647.000	
		02.2.0 4.01.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	jumlah riset dalam kebijakan setiap tahun	0 kali	2	81.107.000	1	450.000.000	0	0	0	0	0	3	531.107.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

				Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	0 Dokumen	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	1	5.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		02.2.0 4.03.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	jumlah laporan sinergitas yang dilakukan penelitian dan pengembangan	0 Dok	1	281.540.000	1	400.000.000	0	0	0	0	0	2	681.540.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		02.2.0 4.04.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Riset, Magang (Kerja Praktek) dan KKN mahasiswa yang difasilitasi	0 Dok	1	300.000.000	1	300.000.000	0	0	0	0	0	2	600.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Meningkatnya implementasi rencana kelitbangan daerah			Prosentase Implementasi Rencana Kelitbangan Daerah	10 Prosen	0	0	10	0	10	4.600.000.000	10	4.250.000.000	10	4.850.000.000	10	13.700.000.000	
		02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan	0 Prosen	0	0	0	0	10	4.600.000.000	10	4.250.000.000	10	4.850.000.000	10	13.700.000.000	
		02.2.0 1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	0 Dok	0	0	0	0	1	700.000.000	1	1.200.000.000	1	700.000.000	3	2.600.000.000	
		02.2.0 1.03.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah penelitian bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.	0 Dok	0	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	1	500.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		02.2.0 1.05.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang keuangan, aset daerah dan reformasi birokrasi (pajak daerah, barang milik daerah dan reformasi birokrasi).	0 Dok	0	0	0	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		02.2.0 1.12.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	0 Dok	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		02.2.0 2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0 Dok	0	0	1	0	1	700.000.000	1	850.000.000	1	950.000.000	4	2.500.000.000	
		02.2.0 2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang sosial (Kemiskinan, Penyakit Masyarakat, Penyakit tidak menular, jaminan kesehatan daerah).	0 Dok	0	0	0	0	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	700.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

		02.2.0 2.04.	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah penelitian dan karya tulis tingkat remaja yang dihasilkan dan memenuhi kriteria pemenang	0 Dok	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		02.2.0 2.05.	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang pariwisata (destinasi wisata, wisata budaya, master plan, road map pariwisata, urban tourism)	0 Dok	0	0	0	0	1	400.000.000	1	500.000.000	1	600.000.000	3	1.500.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		02.2.0 3.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0 Dok	0	0	0	0	1	2.250.000.000	1	1.250.000.000	1	2.200.000.000	3	5.700.000.000	
		02.2.0 3.02.	Penelitian dan pengembangan bidang Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang ekonomi (industri, sektor informal, pasar digital, branding daerah).	0 Dok	0	0	0	0	1	250.000.000	1	250.000.000	0	0	2	500.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		02.2.0 3.04.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi pertanian.	0 Dok	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0	1	350.000.000	2	550.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		02.2.0 3.07.	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang lingkungan hidup (konservasi lingkungan, bencana alam dan ruang terbuka hijau).	0 Dok	0	0	0	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		02.2.0 3.09.	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum (infrastruktur jalan, jembatan dan pengelolaan sumber daya air).	0 Dok	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	1	500.000.000	2	1.000.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		02.2.0 3.10.	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang perhubungan (transportasi, moda transportasi massal).	0 Dok	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	1	350.000.000	2	650.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		02.2.0 3.12.	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang dan pertanahan (penataan ruang kota dan perdesaan, pengelolaan pertanahan)	0 Dok	0	0	0	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		02.2.0 4.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	0 Dok	0	0	0	0	1	950.000.000	1	950.000.000	1	1.000.000.000	4	2.900.000.000	

		02.2.0 4.01.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen riset/pengembangan inovasi dan teknologi	0 Dokumen	0	0	0	0	1	450.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	3	1.400.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		02.2.0 4.03.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Dokumen hasil diseminasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	0 Dokumen	0	0	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	3	900.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		02.2.0 4.04.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumen sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan daerah	0 Dokumen	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
JUMLAH							16.712.503.000		34.944.047.800		31.622.555.000		41.220.690.000		43.345.590.000		167.845.385.800	

SUMBER, 2021

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON

SUHARTONO, S.Sos., MM.
NIP. 196908121990031008

